



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN e-KINERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat diberikan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara guna menegakkan disiplin dan meningkatkan kinerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

- 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN e-KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan umum dan tambahan penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK berdasarkan penilaian disiplin dan kinerja.
10. Hari kerja adalah lima hari perpekan yang ditetapkan sebagai hari kerja mulai hari senin sampai dengan hari jumat.
11. Jam Kerja adalah jam kerja efektif dalam lima hari kerja yaitu 37 jam 30 menit.
12. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
17. e-Kinerja adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai berdasarkan indikator disiplin dan indikator kinerja
18. Pengelola website adalah pegawai/programmer yang mengembangkan, memelihara, mengamankan serta memastikan aplikasi e-kinerja dapat berjalan dengan baik
19. Admin kabupaten adalah pegawai yang ditunjuk mengelola data master perhitungan TPP, melakukan monitoring dan memverifikasi data kepegawaian yang telah diinput oleh admin TPP SKPD di aplikasi e-kinerja Pemerintah Kabupaten Barru
20. Data master adalah nomenklatur SKPD dan dasar hitung capaian TPP yang meliputi pengaturan bobot indikator disiplin dan kinerja, jumlah hari kerja, upacara dan jumlah apel dalam satu bulan pada satu bulan kalender
21. Admin TPP SKPD adalah Pembuat Daftar Gaji/Pengelola Data TPP yang ditunjuk sebagai pengolah data dan memproses hasil pencapaian nilai disiplin dan pencapaian nilai kinerja pada aplikasi e-kinerja di setiap SKPD/UPTD.
22. User Pegawai adalah Pegawai yang melaporkan kegiatan perhari dan menilai laporan harian yang telah dikirim bawahannya di sistem aplikasi e-kinerja
23. Laporan harian adalah rincian kegiatan/pekerjaan pegawai perhari kerja yang diinput oleh penerima TPP pada aplikasi e-kinerja
24. Pelaporan Tepat Waktu adalah dikirimkannya secara daring (dalam jaringan) laporan harian kepada atasan langsung dalam kurun waktu 24 jam dan / atau satu hari kerja berikutnya setelah dilaksanakannya kegiatan yang dilaporkan.
25. Pelaporan Terlambat adalah dikirimkannya secara dalam jaringan (daring) laporan harian kepada atasan langsung melampaui batas tepat waktu dan masih dalam satu masa penilaian TPP.
26. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam uraian tugas yang telah ditetapkan. Daftar TPP adalah daftar rekapitulasi capaian indikator disiplin dan indikator kinerja TPP pegawai dan daftar tanda terima TPP yang dicetak melalui aplikasi e-kinerja.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud TPP adalah untuk mewujudkan terlaksananya pemberian TPP yang bersumber dari APBD selain gaji dan tunjangan lainnya.

Pasal 3

Tujuan TPP adalah untuk :

- a. meningkatkan disiplin pegawai; dan
- b. meningkatkan kinerja pegawai.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. penerima TPP;
- b. besaran nilai TPP;
- c. indikator penilaian TPP;
- d. penilaian kehadiran;
- e. pengurangan TPP;
- f. tata cara perhitungan pembayaran tambahan penghasilan;
- g. pencatatan kehadiran;
- h. monitoring dan evaluasi; dan
- i. pengawasan dan sanksi

BAB III

PENERIMA TPP

Pasal 5

Penerima TPP diberikan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.

Pasal 6

Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dikecualikan bagi PNS, CPNS dan PPPK jabatan fungsional yang mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Pasal 7

- (1) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tidak diberikan kepada:
- a. pegawai yang tidak melaksanakan penyusunan dan pengisian sasaran kerja pegawai;
 - b. pegawai yang diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - c. pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan pemerintahan;
 - d. pegawai yang menjadi pejabat negara;

- e. pegawai yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
 - f. pegawai yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan selesainya permasalahan hukum tersebut;
 - g. pegawai yang sedang tugas belajar;
 - h. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar pemerintah daerah; dan/atau
 - i. pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru kecuali Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan/ditugaskan pada Instansi Penyelenggara Pemilihan Umum.
- (2) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dapat dibayarkan apabila :
- a. telah menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pegawai yang telah ditetapkan sebagai wajib lapor LHKPN;
 - b. telah mengembalikan aset daerah sesuai penggunaannya bagi pegawai yang menguasai/memanfaatkan aset daerah yang tidak berhak/tidak berwenang;
 - c. telah menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan Aparatur Fungsional dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah atas nilai kerugian yang harus dikembalikan dan/atau telah menandatangani Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak atas nilai kerugian yang harus dikembalikan.
- (3) Rekomendasi bagi Pegawai yang telah ditetapkan sebagai wajib lapor LHKPN yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diproses pada Bagian Hukum dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Rekomendasi bagi Pegawai yang menguasai/memanfaatkan aset daerah secara tidak berhak yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diproses pada Bidang Aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Rekomendasi bagi pegawai yang memiliki temuan hasil pemeriksaan dan tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diproses oleh Tim Tindak Lanjut dan ditetapkan oleh Ketua Tim Tindak Lanjut.

Pasal 8

- (1) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dapat memperoleh Tambahan Penghasilan Lainnya dengan kriteria :
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Penerima Tambahan Penghasilan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang.

BAB IV BESARAN NILAI TPP

Pasal 9

- (1) Besaran nilai TPP terdiri atas besaran nilai TPP Umum dan besaran nilai TPP lainnya.
- (2) Besaran nilai TPP umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut, nama jabatan, kelas jabatan, dan nilai jabatan sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Bupati ini
- (3) Besaran nilai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan atas dasar hasil evaluasi jabatan dengan menggunakan metode faktor evaluasi sistem, indeks harga nilai jabatan dan Persentase Kemampuan Keuangan Daerah serta Tambahan Penghasilan Lainnya.
- (4) Tambahan Penghasilan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan akumulasi honorarium yang didasarkan pada Analisis Standar Biaya dengan dasar honorarium kegiatan pada APBD atau sejak Identifikasi dan pemberian *single salary* ditetapkan dan menurut 5 (lima) kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal (8).
- (5) Besaran nilai TPP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan menurut, nama pegawai sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (6) Besaran nilai TPP bagi calon pegawai negeri sipil yaitu 80 % (delapan puluh persen) dari besaran nilai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V
INDIKATOR PENILAIAN TPP

Pasal 10

- (1) TPP dinilai berdasarkan atas pencapaian disiplin dan pencapaian kinerja yang dinilai harian kemudian diakumulasi dalam satu masa penilaian TPP.
- (2) Satu masa penilaian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan kalender dimulai sejak tanggal 1 pada bulan yang dinilai dan ditetapkan hasilnya paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 11

Penilaian TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) masing-masing memiliki bobot perhitungan yaitu:

- a. pencapaian disiplin memiliki bobot TPP 40% (empat puluh persen); dan
- b. pencapaian kinerja memiliki bobot TPP 60% (enam puluh persen).

Pasal 12

- (1) Pencapaian disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a dinilai setiap hari berdasarkan keterpenuhan beberapa indikator, yaitu:
 - a. keterpenuhan apel masuk;
 - b. keterpenuhan apel pulang;
 - c. keterpenuhan upacara penaikan bendera hari Senin;
 - d. keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional;
 - e. keterpenuhan jam kerja harian; dan
 - f. keterpenuhan hari kerja.
- (2) Indikator pencapaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing memiliki bobot indikator sesuai keutamaannya dan dasar hitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perhitungan keterpenuhan pencapaian disiplin.
- (3) Bobot indikator, dasar hitung, dan perhitungan keterpenuhan pencapaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b diukur melalui laporan harian yang dilaporkan sejak terlaksananya kegiatan oleh

- pegawai yang dinilai kepada atasan langsungnya dan dinilai setiap hari oleh atasan langsungnya berdasarkan 2 (dua) indikator, yaitu:
- a. ketepatan waktu dan ada tidaknya laporan harian; dan
 - b. kesesuaian laporan dengan uraian tugas.
- (2) Ketepatan waktu dan ada tidaknya laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut :
- a. pelaporan tepat waktu;
 - b. pelaporan terlambat; atau
 - c. tidak ada laporan.
- (3) Kesesuaian laporan harian dengan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan;
 - b. melaksanakan tugas pokok;
 - c. melaksanakan tugas tambahan; atau
 - d. tidak melaksanakan tugas pokok dan/atau tugas tambahan.
- (4) Indikator pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) masing-masing memiliki nilai sesuai keutamaannya yang menjadi dasar perhitungan keterpenuhan pencapaian kinerja.
- (5) Laporan harian di input dan dikirim melalui aplikasi e-kinerja sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terdapat pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini

BAB VI

PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 14

- (1) Pegawai masuk dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dengan mengisi daftar hadir secara elektronik (*finger print*) dan/atau perangkat lain.
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) kali yaitu pada waktu masuk kerja, masuk kerja setelah jam istirahat, dan pada waktu pulang kerja.
- (3) Pencatatan atau pengisian daftar hadir secara manual hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik, mengalami kerusakan atau tidak berfungsi; atau
 - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik.

- (4) Daftar hadir secara manual akibat perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a digunakan paling lama 1 (satu) bulan

Pasal 15

- (1) Pencatatan atau pengisian daftar hadir Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah diatur tersendiri oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencatatan atau pengisian daftar hadir Pegawai pada UPTD. Dinas Kesehatan Puskesmas rawat inap diatur tersendiri oleh Kepala UPTD. Dinas Kesehatan Puskesmas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pencatatan atau pengisian daftar hadir Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diatur tersendiri oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pencatatan atau pengisian daftar hadir bagi Pegawai pada Satuan Pendidikan Lingkup Dinas Pendidikan diatur tersendiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGURANGAN TPP

Pasal 16

- (1) Pengurangan TPP pencapaian disiplin diberikan kepada :
 - a. pegawai yang tidak mengikuti apel masuk;
 - b. pegawai yang tidak mengikuti apel pulang;
 - c. pegawai yang tidak mengikuti upacara hari senin;
 - d. pegawai yang tidak mengikuti upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional;
 - e. pegawai yang tidak memenuhi jam kerja harian; dan/atau
 - f. pegawai yang tidak memenuhi hari kerja.
- (2) Pengurangan TPP pencapaian kinerja diberikan kepada :
 - a. pegawai yang tidak memenuhi ketepatan waktu memberikan laporan harian;
 - b. pegawai yang tidak memiliki laporan harian; dan/atau
 - c. pegawai yang tidak melaksanakan tugas pokok sesuai uraian tugas.

Pasal 17

- (1) Tidak dilakukan pengurangan TPP bagi pegawai apabila :
 - a. mengikuti pendidikan dan pelatihan; atau
 - b. melaksanakan tugas luar.
- (2) Mengikuti pendidikan dan pelatihan atau melaksanakan tugas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan secara administrasi, berupa :
 - a. surat tugas;
 - b. undangan rapat;
 - c. disposisi pimpinan; dan/atau
 - d. bukti lain yang diakui.
- (3) Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau melaksanakan tugas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung memenuhi pencapaian disiplin dan pencapaian kinerja selama hari penugasan.

BAB VIII
APLIKASI E-KINERJA
Pasal 18

Pengguna aplikasi e-kinerja terdiri atas :

- a. pengelola website;
- b. admin kabupaten;
- c. admin TPP SKPD; dan
- d. user pegawai.

Pasal 19

- (1) Pengelola website sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 huruf a memiliki tugas, antara lain :
 - a. merancang dan mengupdate aplikasi e-kinerja;
 - b. memelihara dan merawat aplikasi e-kinerja yang meliputi perbaikan dan penyesuaian alur aplikasi;
 - c. memastikan data yang masuk disistem tidak tertunda; dan
 - d. memastikan aplikasi berjalan dan berfungsi dengan baik.
- (2) Admin kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b memiliki tugas, antara lain :
 - a. mengelola data master perhitungan TPP;
 - b. mengelola dan menginput username dan password admin TPP SKPD/UPTD;
 - c. memonitoring dan memverifikasi data kepegawaian yang telah diinput admin TPP SKPD di sistem aplikasi e-kinerja;

- d. melayani konsultasi TPP dan aplikasi e-kinerja; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Pengelola website/programmer.
- (3) Admin TPP SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c memiliki tugas, antara lain :
- a. melakukan konsultasi dengan Admin Kabupaten bila mana ada masalah atau kendala dalam proses TPP dan aplikasi e-kinerja;
 - b. mengelola dan menginput data pegawai yang ada pada SKPD/UPTDnya di aplikasi e-kinerja;
 - c. menginput data kehadiran pegawai berdasarkan print out pinger frint, apel masuk, apel pulang, dan kehadiran upacara di aplikasi e-kinerja;
 - d. melakukan komunikasi mengenai kehadiran pegawai;
 - e. memproses capaian indikator disiplin dan indikator kinerja pada aplikasi e-kinerja;
 - f. melakukan pengecekan proses penilaian berdasarkan indikator TPP; dan
 - g. menginventarisir dan mengarsipkan bukti pendukung pencapaian disiplin dan pencapaian kinerja.
- (4) User pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf d memiliki tugas, antara lain :
- a. menginput uraian, waktu dan output laporan harian di aplikasi e-kinerja;
 - b. menilai dan menyetujui laporan harian yang dikirim oleh pegawai yang dinilai; dan
 - c. melakukan konsultasi dengan admin TPP SKPD bilamana ada masalah atau kendala dalam menggunakan aplikasi e-kinerja.

BAB IX

TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan secara langsung melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penetapan hasil perhitungan TPP.

Pasal 21

- (1) Besarnya TPP yang diterima setiap bulan adalah total akumulasi besaran hasil penilaian indikator keterpenuhan pencapaian disiplin dan hasil penilaian TPP indikator keterpenuhan pencapaian kinerja yang berhak

diterima setelah dilakukan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.

- (2) TPP yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan kewajiban membayar pajak penghasilan dan dapat dilakukan pemotongan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) TPP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru.
- (2) TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan daftar TPP.

Pasal 23

- (1) Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu.
- (2) Waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TPP pada bulan Desember dibayar paling lambat tanggal 27 Desember.
- (4) Masa penilaian pada bulan Desember hanya sampai tanggal 20 Desember.

Pasal 24

Pembayaran TPP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. admin TPP SKPD melakukan proses dan pencetakan daftar TPP pada aplikasi e-kinerja paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya;
- b. daftar TPP yang telah dicetak diverifikasi oleh Kasubag Keuangan atau pejabat yang ditunjuk;
- c. paling lama 2 (dua) hari kerja setelah daftar TPP dicetak dan diverifikasi, daftar TPP disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditanda tangani;
- d. surat pengantar permintaan pencairan dan daftar TPP yang telah ditandatangani kepala SKPD dengan melampirkan daftar rekening tabungan pegawai, disampaikan oleh admin TPP SKPD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atas permintaan Bendahara PPKD, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai nilai total daftar TPP SKPD; dan
- f. Bendahara PPKD membayarkan TPP kepada masing-masing SKPD sesuai dengan daftar TPP yang disetorkan sebelumnya melalui admin TPP SKPD.

Pasal 25

Pengelolaan dan perhitungan nilai pencapaian disiplin dan nilai pencapaian kinerja dilakukan sistem aplikasi e-kinerja setelah di proses oleh admin TPP SKPD pada Setiap SKPD/UPTD.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI TPP

Pasal 26

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemberian TPP dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk :
 - a. tim monitoring dan evaluasi TPP SKPD; dan
 - b. tim monitoring dan evaluasi TPP Kabupaten.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi TPP SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dibentuk sesuai kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Tim monitoring dan evaluasi TPP SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Susunan tim monitoring dan evaluasi TPP SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Susunan tim monitoring dan evaluasi TPP SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Tugas tim monitoring dan evaluasi TPP SKPD adalah :
 - a. memantau proses implementasi TPP pada pegawai dalam lingkup SKPD/UPTD/Unit kerja;
 - b. memberikan informasi pelaksanaan TPP; dan
 - c. menginventarisir permasalahan dan memberikan solusi implementasi TPP.
- (5) Hasil laporan tim monitoring TPP SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada tim monitoring TPP kabupaten setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 28

- (1) Tim monitoring dan evaluasi TPP kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan tim monitoring dan evaluasi TPP kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Tugas tim monitoring dan evaluasi TPP kabupaten adalah :
 - a. menerima dan menindaklanjuti laporan tim monitoring dan evaluasi TPP SKPD;
 - b. melakukan pembinaan implementasi TPP pada SKPD; dan
 - c. menginventarisir permasalahan dan memberikan solusi implementasi TPP.
- (4) Hasil laporan tim monitoring TPP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 29

Atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pencapaian disiplin dan pencapaian kinerja setiap bulan kepada masing-masing pegawainya.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberikan Upah Pungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah di bidang kesehatan dapat diberikan Jasa Medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa meliputi Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Administrasi Pekerjaan dapat diberikan Honorarium tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Honorarium bagi Non PNS atau bagi Pegawai yang bukan Pegawai Pemerintah Daerah tetap dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama jabatan, kelas jabatan, pangkat, dan/atau golongan ruang setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini dibayarkan setelah Besaran Nilai TPP yang telah disesuaikan diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mendapat persetujuan tertulis Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Barru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Nomor 7) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

| PARAF KOORDINASI | |
|--|---|
| Kepala BKPSDM | b |
| Kabid Intel, Perencanaan, Lemera dan Penghogan | V |
| Kabid Perencanaan dan Evaluasi Lemera | H |
| Diteliti tanggal | |

Ditetapkan di Barru

pada tanggal, 1 Agustus 2019

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal, 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 25

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BARRU**NOMOR :25 TAHUN 2019****TANGGAL : 1 AGUSTUS 2019****BESARAN NILAI TPP UMUM JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRASI
DAN JABATAN FUNGSIONAL****A. JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI**

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|------------|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sekretaris Daerah | 15 | 4.728.150 |
| 2 | Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 14 | 4.029.900 |
| 3 | Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan | 14 | 4.029.900 |
| 4 | Asisten Administrasi Umum | 14 | 4.029.900 |
| 5 | Inspektur Kabupaten | 14 | 4.029.900 |
| 6 | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 14 | 4.029.900 |
| 7 | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 14 | 4.029.900 |
| 8 | Kepala Badan Pendapatan Daerah | 14 | 4.029.900 |
| 9 | Sekretaris DPRD | 14 | 3.810.450 |
| 10 | Kepala Dinas Pendidikan | 14 | 3.810.450 |
| 11 | Kepala Dinas Kesehatan | 14 | 3.810.450 |
| 12 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 14 | 3.810.450 |
| 13 | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 14 | 3.810.450 |
| 14 | Kepala Dinas Sosial | 14 | 3.810.450 |
| 15 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 14 | 3.810.450 |
| 16 | Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Tenaga Kerja | 14 | 3.810.450 |
| 17 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak | 14 | 3.810.450 |

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|------------|---|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 14 | 3.810.450 |
| 19 | Kepala Dinas Pertanian | 14 | 3.810.450 |
| 20 | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 14 | 3.810.450 |
| 21 | Kepala Dinas Perikanan | 14 | 3.810.450 |
| 22 | Kepala Dinas Perhubungan | 14 | 3.810.450 |
| 23 | Kepala Dinas Pariwisata | 14 | 3.810.450 |
| 24 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 14 | 3.810.450 |
| 25 | Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan | 14 | 3.810.450 |
| 26 | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 14 | 3.810.450 |
| 27 | Kepala Dinas Ketahanan Pangan | 14 | 3.810.450 |
| 28 | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 14 | 3.810.450 |
| 29 | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 14 | 3.810.450 |
| 30 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 14 | 3.810.450 |
| 31 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 14 | 3.810.450 |
| 32 | Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik | 13 | 3.610.950 |
| 33 | Staf ahli bidang Pembangunan dan Ekonomi | 13 | 3.610.950 |
| 34 | Staf ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia | 13 | 3.610.950 |
| 35 | Direktur Rumah Sakit Umum | 12 | 3.078.950 |
| 36 | Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah | 12 | 3.078.950 |
| 37 | Camat | 12 | 3.078.950 |

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|------------|--|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 38 | Sekretaris Inspektorat Daerah | 12 | 2.846.200 |
| 39 | Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 12 | 2.846.200 |
| 40 | Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 12 | 2.846.200 |
| 41 | Sekretaris Badan Pendapatan Daerah | 12 | 2.846.200 |
| 42 | Sekretaris Dinas Pendidikan | 12 | 2.812.950 |
| 43 | Sekretaris Dinas Kesehatan | 12 | 2.812.950 |
| 44 | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 12 | 2.812.950 |
| 45 | Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 12 | 2.812.950 |
| 46 | Sekretaris Dinas Sosial | 12 | 2.812.950 |
| 47 | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 12 | 2.812.950 |
| 48 | Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Tenaga Kerja | 12 | 2.812.950 |
| 49 | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak | 12 | 2.812.950 |
| 50 | Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 12 | 2.812.950 |
| 51 | Sekretaris Dinas Pertanian | 12 | 2.812.950 |
| 52 | Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 12 | 2.812.950 |
| 53 | Sekretaris Dinas Perikanan | 12 | 2.812.950 |
| 54 | Sekretaris Dinas Perhubungan | 12 | 2.812.950 |
| 55 | Sekretaris Dinas Pariwisata | 12 | 2.812.950 |
| 56 | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup | 12 | 2.812.950 |

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|------------|--|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 57 | Sekretaris Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan | 12 | 2.812.950 |
| 58 | Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 12 | 2.812.950 |
| 59 | Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan | 12 | 2.812.950 |
| 60 | Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 12 | 2.812.950 |
| 61 | Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 12 | 2.812.950 |
| 62 | Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 12 | 2.812.950 |
| 63 | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 12 | 2.812.950 |
| 64 | Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD | 11 | 2.779.700 |
| 65 | Sekretaris Camat | 11 | 2.779.700 |
| 66 | Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah | 11 | 2.719.850 |
| 67 | Kepala Bidang pada Badan Daerah | 11 | 2.719.850 |
| 68 | Kepala Bidang pada Dinas Daerah | 11 | 2.719.850 |
| 69 | Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah | 11 | 2.719.850 |
| 70 | Inspektur Pembantu | 11 | 2.646.700 |
| 71 | Lurah | 9 | 2.048.200 |
| 72 | Kepala Seksi Pada Kantor Kecamatan yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 7 | 9 | 1.935.150 |
| 73 | Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 7 | 9 | 1.901.900 |
| 74 | Kepala Subbagian pada Sekretariat DPRD yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 7 | 9 | 1.901.900 |
| 75 | Kepala Sub Bagian pada Badan Daerah yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 7 | 9 | 1.901.900 |
| 76 | Kepala Sub Bagian pada Dinas Daerah yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 7 | 9 | 1.901.900 |

v

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|------------|--|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 77 | Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Daerah yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 7 | 9 | 1.901.900 |
| 78 | Kepala Sub Bagian pada SATPOL PP & Pemadam Kebakaran yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 7 | 9 | 1.901.900 |
| 79 | Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 7 | 9 | 1.901.900 |
| 80 | Kepala Sub Bidang pada Badan Daerah yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 7 | 9 | 1.901.900 |
| 81 | Kepala Seksi pada Dinas Daerah yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 7 | 9 | 1.901.900 |
| 82 | Kepala Seksi pada SATPOL PP & Pemadam Kebakaran yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 7 | 9 | 1.901.900 |
| 83 | Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 7 | 9 | 1.901.900 |
| 84 | Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) | 9 | 1.901.900 |
| 85 | Sekretaris Kelurahan | 8 | 1.755.600 |
| 86 | Kepala Sub Bagian pada Kantor Kecamatan | 8 | 1.755.600 |
| 87 | Kepala Seksi Pada Kantor Kecamatan yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 6 | 8 | 1.722.350 |
| 88 | Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 6 | 8 | 1.722.350 |
| 89 | Kepala Subbagian pada Sekretariat DPRD yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 6 | 8 | 1.722.350 |
| 90 | Kepala Sub Bagian pada Badan Daerah yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 6 | 8 | 1.722.350 |
| 91 | Kepala Sub Bagian pada Dinas Daerah yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 6 | 8 | 1.722.350 |
| 92 | Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Daerah yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 6 | 8 | 1.722.350 |
| 93 | Kepala Sub Bagian pada SATPOL PP & Pemadam Kebakaran yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 6 | 8 | 1.722.350 |
| 94 | Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 6 | 8 | 1.722.350 |
| 95 | Kepala Subbidang pada Badan Daerah yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 6 | 8 | 1.722.350 |

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|------------|---|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 96 | Kepala Seksi pada Dinas Daerah yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 6 | 8 | 1.722.350 |
| 97 | Kepala Seksi pada SATPOL PP & Pemadam Kebakaran yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 6 | 8 | 1.722.350 |
| 98 | Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah yang memimpin Pejabat Pelaksana Tertinggi Kelas 6 | 8 | 1.722.350 |
| 99 | Kepala Seksi pada Kantor Kelurahan | 8 | 1.722.350 |
| 100 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD | 8 | 1.722.350 |
| 101 | Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah | 7 | 1.183.700 |
| 102 | Jabatan Pelaksana pada Sekretariat DPRD | 7 | 1.183.700 |
| 103 | Jabatan Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten | 7 | 1.183.700 |
| 104 | Jabatan Pelaksana pada Badan Daerah | 7 | 1.183.700 |
| 105 | Jabatan Pelaksana pada Dinas Daerah | 7 | 1.183.700 |
| 106 | Jabatan Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 7 | 1.183.700 |
| 107 | Jabatan Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah | 7 | 1.183.700 |
| 108 | Jabatan Pelaksana pada Kantor Kecamatan | 7 | 1.183.700 |
| 109 | Jabatan Pelaksana pada Kantor Kelurahan | 7 | 1.183.700 |
| 110 | Jabatan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) | 7 | 1.183.700 |
| 111 | Bendahara | 7 | 1.183.700 |
| 112 | Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah | 6 | 917.700 |
| 113 | Jabatan Pelaksana pada Sekretariat DPRD | 6 | 917.700 |
| 114 | Jabatan Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten | 6 | 917.700 |
| 115 | Jabatan Pelaksana pada Badan Daerah | 6 | 917.700 |

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|------------|--|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 116 | Jabatan Pelaksana pada Dinas Daerah | 6 | 917.700 |
| 117 | Jabatan Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 6 | 917.700 |
| 118 | Jabatan Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah | 6 | 917.700 |
| 119 | Jabatan Pelaksana pada Kantor Kecamatan | 6 | 917.700 |
| 120 | Jabatan Pelaksana pada Kantor Kelurahan | 6 | 917.700 |
| 121 | Jabatan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) | 6 | 917.700 |
| 122 | Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah | 5 | 651.700 |
| 123 | Jabatan Pelaksana pada Sekretariat DPRD | 5 | 651.700 |
| 124 | Jabatan Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten | 5 | 651.700 |
| 125 | Jabatan Pelaksana pada Badan Daerah | 5 | 651.700 |
| 126 | Jabatan Pelaksana pada Dinas Daerah | 5 | 651.700 |
| 127 | Jabatan Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 5 | 651.700 |
| 128 | Jabatan Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah | 5 | 651.700 |
| 129 | Jabatan Pelaksana pada Kantor Kecamatan | 5 | 651.700 |
| 130 | Jabatan Pelaksana pada Kantor Kelurahan | 5 | 651.700 |
| 131 | Jabatan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) | 5 | 651.700 |
| 132 | Jabatan Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah | 4 | 585.200 |
| 133 | Jabatan Pelaksana Pada UPTD Puskesmas | 4 | 585.200 |
| 134 | Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah | 3 | 452.200 |
| 135 | Jabatan Pelaksana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 3 | 452.200 |

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|-----|---|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 136 | Jabatan Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 3 | 452.200 |
| 137 | Jabatan Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah | 3 | 452.200 |
| 138 | Jabatan Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3 | 452.200 |
| 139 | Jabatan Pelaksana pada Dinas Sosial | 3 | 452.200 |
| 140 | Jabatan Pelaksana pada Dinas Pariwisata | 3 | 452.200 |
| 141 | Jabatan Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja | 3 | 452.200 |
| 142 | Jabatan Pelaksana pada Dinas Pendidikan (UPT Satuan Pendidikan Formal SMP/SD) | 3 | 452.200 |
| 143 | Jabatan Pelaksana pada Dinas Perhubungan | 1 | 252.700 |
| 144 | Jabatan Pelaksana pada Dinas Sosial | 1 | 252.700 |
| 145 | Jabatan Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 1 | 252.700 |
| 146 | Jabatan Pelaksana pada Kantor Kecamatan | 1 | 252.700 |
| 147 | Jabatan Pelaksana pada Dinas Pendidikan (UPT Satuan Pendidikan Formal SMP/SD) | 1 | 252.700 |

B. JABATAN FUNGSIONAL

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|-----|--|---------------|--------------------------|
| | SEKRETARIAT DAERAH | | |
| 1 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya | 11 | 2.566.900 |
| 2 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda | 9 | 1.802.150 |
| 3 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 4 | Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Madya | 11 | 2.606.800 |
| 5 | Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Muda | 9 | 1.842.050 |
| 6 | Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Pertama | 8 | 1.742.300 |

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|------------|--|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Pranata Hubungan Masyarakat Madya | 11 | 2.566.900 |
| 8 | Pranata Hubungan Masyarakat Muda | 9 | 1.802.150 |
| 9 | Pranata Hubungan Masyarakat Pertama | 8 | 1.702.400 |
| | SEKRETARIAT DPRD | | |
| 10 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 11 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 12 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| | INSPEKTORAT DAERAH | | |
| 13 | Auditor Madya | 11 | 2.566.900 |
| 14 | Auditor Muda | 9 | 1.802.150 |
| 15 | Auditor Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 16 | Auditor Penyelia | 8 | 1.635.900 |
| 17 | Auditor Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.336.650 |
| 18 | Auditor Pelaksana | 6 | 984.200 |
| 19 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Madya | 11 | 2.566.900 |
| 20 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Muda | 9 | 1.802.150 |
| 21 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 22 | Auditor Kepegawaian Madya | 11 | 2.566.900 |
| 23 | Auditor Kepegawaian Muda | 9 | 1.802.150 |
| 24 | Auditor Kepegawaian Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 25 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 26 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|------------|---|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| | DINAS PENDIDIKAN | | |
| 28 | Guru Madya | 11 | 2.606.800 |
| 29 | Guru Muda | 9 | 1.842.050 |
| 30 | Guru Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 31 | Pengawas Sekolah Madya | 11 | 2.606.800 |
| 32 | Pengawas Sekolah Muda | 9 | 1.842.050 |
| 33 | Pengawas Sekolah Pertama | 8 | 1.742.300 |
| 34 | Penilik Madya | 11 | 2.566.900 |
| 35 | Penilik Muda | 9 | 1.802.150 |
| 36 | Penilik Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 37 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 38 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 39 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 40 | Guru Non Sertifikasi | 5 | 651.700 |
| | UPT Satuan Pendidikan Non Formal SKB | | |
| 41 | JF Pamong Belajar Madya | 11 | 2.566.900 |
| 42 | JF Pamong Belajar Muda | 9 | 1.802.150 |
| 43 | JF Pamong Belajar Pertama | 8 | 1.702.400 |
| | DINAS KESEHATAN | | |
| 44 | Administrator Kesehatan Madya | 11 | 2.566.900 |
| 45 | Administrator Kesehatan Muda | 9 | 1.802.150 |

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|------------|---|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 46 | Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 47 | Analisis Kepegawaian Madya | 11 | 2.566.900 |
| 48 | Analisis Kepegawaian Muda | 9 | 1.802.150 |
| 49 | Analisis Kepegawaian Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 50 | Analisis Kepegawaian Penyelia | 8 | 1.635.900 |
| 51 | Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.336.650 |
| 52 | Analisis Kepegawaian Pelaksana | 6 | 984.200 |
| 53 | Apoteker Madya | 11 | 2.586.850 |
| 54 | Apoteker Muda | 9 | 1.822.100 |
| 55 | Apoteker Pertama | 8 | 1.722.350 |
| 56 | Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 1.655.850 |
| 57 | Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.356.600 |
| 58 | Asisten Apoteker Pelaksana | 6 | 1.004.150 |
| 59 | Asisten Apoteker Pelaksana Pemula | 5 | 671.650 |
| 60 | Bidan Madya | 11 | 2.566.900 |
| 61 | Bidan Muda | 9 | 1.802.150 |
| 62 | Bidan Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 63 | Bidan Penyelia | 8 | 1.635.900 |
| 64 | Bidan Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.336.650 |
| 65 | Bidan Pelaksana | 6 | 984.200 |
| 66 | Bidan Pelaksana Pemula | 5 | 651.700 |
| 67 | Dokter Gigi Madya | 12 | 2.959.250 |

V

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|------------|--|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 68 | Dokter Gigi Muda | 10 | 2.221.100 |
| 69 | Dokter Gigi Pertama | 9 | 1.822.100 |
| 70 | Dokter Madya | 12 | 2.959.250 |
| 71 | Dokter Muda | 10 | 2.287.600 |
| 72 | Dokter Pertama | 9 | 2.088.100 |
| 73 | Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 2.566.900 |
| 74 | Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 2.068.150 |
| 75 | Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 76 | Epidemiolog Kesehatan Penyelia | 8 | 1.635.900 |
| 77 | Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.336.650 |
| 78 | Epidemiolog Kesehatan Pelaksana | 6 | 984.200 |
| 79 | Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula | 5 | 651.700 |
| 80 | Fisioterapis Madya | 11 | 2.566.900 |
| 81 | Fisioterapis Muda | 9 | 2.068.150 |
| 82 | Fisioterapis Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 83 | Fisioterapis Penyelia | 8 | 1.635.900 |
| 84 | Fisioterapis Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.336.650 |
| 85 | Fisioterapis Pelaksana | 6 | 984.200 |
| 86 | Nutrisionis Madya | 11 | 2.566.900 |
| 87 | Nutrisionis Muda | 9 | 2.068.150 |
| 88 | Nutrisionis Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 89 | Nutrisionis Penyelia | 8 | 1.635.900 |

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|------------|--|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 90 | Nutrisionis Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.336.650 |
| 91 | Nutrisionis Pelaksana | 6 | 984.200 |
| 92 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 2.699.900 |
| 93 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 1.842.050 |
| 94 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1.742.300 |
| 95 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia | 8 | 1.675.800 |
| 96 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.376.550 |
| 97 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana | 6 | 1.024.100 |
| 98 | Perawat Gigi Madya | 11 | 2.606.800 |
| 99 | Perawat Gigi Muda | 9 | 1.842.050 |
| 100 | Perawat Gigi Pertama | 8 | 1.742.300 |
| 101 | Perawat Gigi Penyelia | 8 | 1.675.800 |
| 102 | Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.376.550 |
| 103 | Perawat Gigi Pelaksana | 6 | 1.024.100 |
| 104 | Perawat Gigi Pelaksana Pemula | 5 | 691.600 |
| 105 | Perawat Madya | 11 | 2.606.800 |
| 106 | Perawat Muda | 9 | 1.842.050 |
| 107 | Perawat Pertama | 8 | 1.742.300 |
| 108 | Perawat Penyelia | 8 | 1.675.800 |
| 109 | Perawat Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.376.550 |
| 110 | Perawat Pelaksana | 6 | 1.024.100 |
| 111 | Perawat Pelaksana Pemula | 5 | 691.600 |

v

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|------------|---|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 112 | Perekam Medis Penyelia | 8 | 1.675.800 |
| 113 | Perekam Medis Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.376.550 |
| 114 | Perekam Medis Pelaksana | 6 | 1.024.100 |
| 115 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 116 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 117 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 118 | Perekam Medis Madya | 11 | 2.606.800 |
| 119 | Perekam Medis Muda | 9 | 1.842.050 |
| 120 | Perekam Medis Pertama | 8 | 1.742.300 |
| 121 | Perekam Medis Penyelia | 8 | 1.675.800 |
| 122 | Perekam Medis Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.376.550 |
| 123 | Perekam Medis Pelaksana | 6 | 1.024.100 |
| 124 | Pranata Laboratorium Kesehatan Madya | 11 | 2.566.900 |
| 125 | Pranata Laboratorium Kesehatan Muda | 9 | 1.802.150 |
| 126 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 127 | Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia | 8 | 1.635.900 |
| 128 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.336.650 |
| 129 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | 6 | 984.200 |
| 130 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula | 5 | 691.600 |
| 131 | Radiografer Penyelia | 8 | 1.675.800 |
| 132 | Radiografer Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.376.550 |
| 133 | Radiografer Pelaksana | 6 | 1.024.100 |

V

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|---|---|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 134 | Sanitarian Madya | 11 | 2.566.900 |
| 135 | Sanitarian Muda | 9 | 1.822.100 |
| 136 | Sanitarian Pertama | 8 | 1.722.350 |
| 137 | Sanitarian Penyelia | 8 | 1.655.850 |
| 138 | Sanitarian Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.356.600 |
| 139 | Sanitarian Pelaksana | 6 | 1.004.150 |
| 140 | Sanitarian Pelaksana Pemula | 5 | 671.650 |
| 141 | Teknisi Elektromedik Madya | 11 | 2.566.900 |
| 142 | Teknisi Elektromedik Muda | 9 | 1.822.100 |
| 143 | Teknisi Elektromedik Pertama | 8 | 1.722.350 |
| 144 | Teknisi Elektromedik Penyelia | 8 | 1.675.800 |
| 145 | Teknisi Elektromedik Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.376.550 |
| 146 | Teknisi Elektromedik Pelaksana | 6 | 1.024.100 |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | | | |
| 147 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 148 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 149 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 150 | Polisi Pamong Praja Madya | 11 | 2.566.900 |
| 151 | Polisi Pamong Praja Muda | 9 | 1.802.150 |
| 152 | Polisi Pamong Praja Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 153 | Polisi Pamong Praja Penyelia | 8 | 1.702.400 |
| 154 | Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.336.650 |

V

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|---|---|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 155 | Polisi Pamong Praja Pelaksana | 6 | 984.200 |
| 156 | Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula | 5 | 651.700 |
| BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| 157 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 158 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 159 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 160 | Analisis Kepegawaian Madya | 11 | 2.566.900 |
| 161 | Analisis Kepegawaian Muda | 9 | 1.802.150 |
| 162 | Analisis Kepegawaian Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 163 | Analisis Kepegawaian Penyelia | 8 | 1.635.900 |
| 164 | Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.336.650 |
| 165 | Analisis Kepegawaian Pelaksana | 6 | 984.200 |
| 166 | Pranata Komputer Madya | 11 | 2.566.900 |
| 167 | Pranata Komputer Muda | 9 | 1.802.150 |
| 168 | Pranata Komputer Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 169 | Pranata Komputer Penyelia | 8 | 1.635.900 |
| 170 | Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.336.650 |
| 171 | Pranata Komputer Pelaksana | 6 | 984.200 |
| 172 | Pranata Komputer Pelaksana Pemula | 5 | 651.700 |
| BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH | | | |
| 173 | Analisis kebijakan Madya | 12 | 2.839.550 |

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|------------|---|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 174 | Analisis kebijakan Muda | 10 | 2.307.550 |
| 175 | Analisis kebijakan Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 176 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 177 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 178 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| | DINAS SOSIAL | | |
| 179 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 180 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 181 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| | Pekerja Sosial Ahli Pertama | 8 | 1.702.400 |
| | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | |
| 182 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 183 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 184 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 185 | Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Madya | 11 | 2.566.900 |
| 186 | Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Muda | 9 | 1.802.150 |
| 187 | Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Pertama | 8 | 1.702.400 |
| | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA | | |
| 188 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 189 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 190 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 191 | Pengawas ketenagakerjaan Madya | 11 | 2.566.900 |

v

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|-----|--|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 192 | Pengawas ketenagakerjaan Muda | 9 | 1.802.150 |
| 193 | Pengawas ketenagakerjaan Pertama | 8 | 1.702.400 |
| | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK | | |
| 194 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 195 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 196 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | |
| 197 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 198 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 199 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 200 | Teknisi Penyehatan Lingkungan Muda | 9 | 1.862.000 |
| 201 | Teknisi Penyehatan Lingkungan Pertama | 8 | 1.762.250 |
| | DINAS PERTANIAN | | |
| 202 | Penyuluh Pertanian Madya | 11 | 2.699.900 |
| 203 | Penyuluh Pertanian Muda | 9 | 1.842.050 |
| 204 | Penyuluh Pertanian Pertama | 8 | 1.742.300 |
| 205 | Penyuluh Pertanian Penyelia | 8 | 1.675.800 |
| 206 | Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.376.550 |
| 207 | Penyuluh Pertanian Pelaksana | 6 | 1.024.100 |
| 208 | Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula | 5 | 758.100 |

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|------------|--|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 209 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 210 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 211 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | | |
| 212 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 213 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 214 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 215 | Arsiparis Madya | 11 | 2.566.900 |
| 216 | Arsiparis Muda | 9 | 1.802.150 |
| 217 | Arsiparis Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 218 | Arsiparis Penyelia | 8 | 1.635.900 |
| 219 | Arsiparis Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.336.650 |
| 220 | Arsiparis Pelaksana | 6 | 984.200 |
| 221 | Pustakawan Madya | 11 | 2.566.900 |
| 222 | Pustakawan Muda | 9 | 1.802.150 |
| 223 | Pustakawan Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 224 | Pustakawan Penyelia | 8 | 1.635.900 |
| 225 | Pustakawan Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.336.650 |
| 226 | Pustakawan Pelaksana | 6 | 984.200 |
| | DINAS PERIKANAN | | |
| 227 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 228 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 229 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 230 | Pengawas Perikanan Madya | 11 | 2.566.900 |
| 231 | Pengawas Perikanan Muda | 9 | 1.802.150 |
| 232 | Pengawas Perikanan Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 233 | Pengawas Perikanan Penyelia | 8 | 1.635.900 |
| 234 | Pengawas Perikanan Pelaksana lanjutan | 7 | 1.336.650 |
| 235 | Pengawas Perikanan Pelaksana | 6 | 984.200 |
| | DINAS PERHUBUNGAN | | |
| 236 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 237 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 238 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| | DINAS PARIWISATA | | |
| 239 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 240 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 241 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | |
| 242 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 243 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 244 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 245 | Pengawas Lingkungan Hidup Madya | 11 | 2.566.900 |
| 246 | Pengawas Lingkungan Hidup Muda | 9 | 1.802.150 |

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|---|---|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 247 | Pengawas Lingkungan Hidup Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 248 | Pengendali dampak lingkungan Madya | 11 | 2.566.900 |
| 249 | Pengendali dampak lingkungan Muda | 9 | 1.842.050 |
| 250 | Pengendali dampak lingkungan Pertama | 8 | 1.742.300 |
| 251 | Pengendali dampak lingkungan Penyelia | 8 | 1.675.800 |
| 252 | Pengendali dampak lingkungan Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.376.550 |
| 253 | Pengendali dampak lingkungan Pelaksana | 6 | 1.024.100 |
| DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN | | | |
| 254 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 255 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 256 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 257 | Penera Madya | 11 | 2.566.900 |
| 258 | Penera Muda | 9 | 2.068.150 |
| 259 | Penera Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 260 | Penera Penyelia | 8 | 1.635.900 |
| 261 | Penera Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.336.650 |
| 262 | Penera Pelaksana | 6 | 984.200 |
| 263 | Pengawas Kemetrollogian Madya | 11 | 2.566.900 |
| 264 | Pengawas Kemetrollogian Muda | 9 | 1.842.050 |
| 265 | Pengawas Kemetrollogian Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 266 | Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Madya | 11 | 2.699.900 |
| 267 | Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Muda | 9 | 1.842.050 |

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|---|---|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 268 | Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Pertama | 8 | 1.742.300 |
| 269 | Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Penyelia | 8 | 1.675.800 |
| 270 | Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Pelaksana Lanjutan | 7 | 1.376.550 |
| 271 | Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Pelaksana | 6 | 1.024.100 |
| DINAS KOMUNIKASI, INFOMATIKA DAN STATISTIK | | | |
| 272 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 273 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 274 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 275 | Statistisi Madya | 11 | 2.566.900 |
| 276 | Statistisi Muda | 9 | 1.802.150 |
| 277 | Statistisi Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 278 | Operator transmisi sandi penyelia | 8 | 1.635.900 |
| 279 | Operator transmisi sandi pelaksana lanjutan | 7 | 1.336.650 |
| 280 | Operator transmisi sandi pelaksana | 6 | 984.200 |
| DINAS KETAHANAN PANGAN | | | |
| 281 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 282 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 283 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| 284 | Analisis ketahanan pangan madya | 11 | 2.566.900 |
| 285 | Analisis ketahanan pangan muda | 9 | 1.802.150 |
| 286 | Analisis ketahanan pangan pertama | 8 | 1.702.400 |

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|-----|---|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | |
| 287 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 288 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 289 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | |
| 290 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 291 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 292 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | |
| 293 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 294 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 295 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| | BADAN PENDAPATAN DAERAH | | |
| 296 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 297 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 298 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | |
| 299 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |
| 300 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 301 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |
| | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | |
| 302 | Perencana Madya | 11 | 2.566.900 |

| No. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | JUMLAH TPP PERBULAN (Rp) |
|------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 303 | Perencana Muda | 9 | 1.802.150 |
| 304 | Perencana Pertama | 8 | 1.702.400 |

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BARRU.**NOMOR : 25 TAHUN 2019**
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2019**BESARAN NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019****1. DINAS PENDIDIKAN**

| NO | NAMA | NAMA JABATAN | JUMLAH TPP LAINNYA (Rp) |
|-----------|-----------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ANDI ADNAN AZIS, S.STP.M.Si | Kepala Dinas | 3.689.550 |
| 2 | Drs. H. NAHNU,M.Si | Sekretaris | 1.600.000 |
| 3 | | Kasubag Program | 350.000 |
| 4 | ISMAIL, S.Sos | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 736.300 |
| 5 | BASO MUSTAQIM, S.Sos | Kasubag Keuangan | 198.100 |
| 6 | ARHAM | Bendahara | 1.800.000 |
| 7 | MUHTAR | Pengelola Gaji | 250.000 |
| 8 | KURNIA YULIANI NUR, S.Sos | Pengelola Laporan Keuangan | 362.300 |
| 9 | MULIADI, S.Sos | Kasubag Umum dan SDM | 225.000 |
| 10 | ABDUL KALAM | Pranata Barang dan Jasa | 1.000.000 |
| 11 | IQBAL DARMASENA | Pranata Barang dan Jasa | 400.000 |
| 12 | MUHTAR | Pengelola Kepegawaian | 142.300 |
| 13 | NURSANTI | Pengelola Kepegawaian | 125.000 |
| 14 | TADAR | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor | 125.000 |
| 15 | H. LA SAKKA PANNU, S.Pd | Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan PAUD dan PNF | 100.000 |
| 16 | H. ABD. HAMID, S.Pd, M.Pd | Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan PAUD dan PNF | 100.000 |
| 17 | SURAWALIAH, S.Ag | Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini | 100.000 |
| 18 | Drs. H.JAUHARUDDIN, M.M | Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan PAUD dan PNF | 100.000 |
| 19 | Drs. ZAINAL ABIDIN, M.M | Kabid Pembinaan SD dan SMP | 470.150 |
| 20 | DARMIATI, SH, M.Si | Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan | 300.000 |
| 21 | Hj. ST. HAMRINA, S.Sos | Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan | 96.300 |
| 22 | AKHYAR | Pengelola Penilaian dan Akreditasi Pendidikan | 516.667 |
| 23 | WAHIDA, S.Pd | Pengelola Penilaian dan Akreditasi Pendidikan | 166.667 |
| 24 | GUNAWAN PARENRENGI D, S.T | Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana | 466.667 |

V

| NO | NAMA | NAMA JABATAN | JUMLAH TPP LAINNYA (Rp) |
|--|-----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | AMINUDDIN. P, S.Pd, M.Pd | Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter | 198.100 |
| 26 | MARAWIAH, S.Sos | Analisis Pengelola Peserta Didik | 66.667 |
| 27 | ANDI TUTWURI HANDAYANI | Pengelola Beasiswa | 62.300 |
| 28 | M.HASRUDDIN, S.Pd | Kasi GTK PAUD dan Pendidikan Non Formal | 278.100 |
| 29 | IBRAHIM, S.Sos | Analisis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 300.000 |
| - SEKOLAH | | | |
| 1 | ANSAR, S.Pd | GURU | 400.000 |
| 2 | MUHAMMAD DANIAL DAHLAN | PRANATA BARANG DAN JASA | 400.000 |
| 3 | DARMAYANTI | PRANATA BARANG DAN JASA | 400.000 |
| 4 | Syafri, S.Pd | GURU | 400.000 |
| 5 | ARIFAI, S.Pd | GURU | 400.000 |
| 2. DINAS KESEHATAN | | | |
| 1 | | Kepala Dinas Kesehatan | 6.189.550 |
| 2 | Drs. H. Udding | Sekretaris Dinas Kesehatan | 1.637.050 |
| 3 | Ermy Ekaniswan, SKM | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | 200.000 |
| 4 | AGUSSALIM PAMMU, SKM | Bendahara | 1.300.000 |
| 5 | K A S M I A H | Pengelola Gaji | 250.000 |
| 6 | RUSTIAH | Pengelola Laporan Keuangan | 200.000 |
| 7 | ANDI TENRI AMPA, SKM | Administrator Kesehatan Muda | 817.850 |
| 8 | MARYANI, SKM | Pengelola Kepegawaian | 42.300 |
| 9 | NIRWANA | Pengelola Kepegawaian | 42.300 |
| 10 | S U R I J A | Analisis Kepegawaian Penyelia | 84.100 |
| 11 | drg. ICHWANIAR IDRIS, MM | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat | 520.150 |
| 12 | RAHMA, SKM | Analisis Gizi | 56.300 |
| 13 | NURLINA, SKM | Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi | 47.650 |
| 14 | KARUNIA, S.Farm, Apt | Kepala Seksi Kefarmasian, ALKES dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) | 118.100 |
| 15 | SUKMAWATI, SKM | Administrator Kesehatan Muda | 67.850 |
| 16 | NURHAYATI MT. | Pengadministrasi Umum | 48.300 |
| 2.A. UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PALANRO | | | |
| 1 | dr. HJ. TUTI MOEHAIYANG. S. | Dokter Muda | 200.000 |
| 2 | WIDYA SARIANGRIANI, S.Kep. | Perawat Mahir | 263.450 |

| NO | NAMA | NAMA JABATAN | JUMLAH TPP LAINNYA (Rp) |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.B. UPTD KESEHATAN PUSKESMAS BOJO BARU | | | |
| 1 | Isriani Latif,SKM,M.Kes | Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas | 48.100 |
| 2 | Nirpah,SKM | Bidan Pelaksana Lanjutan | 13.350 |
| 3 | Nurhayati,SKM | Bidan Pelaksana Lanjutan | 13.350 |
| 4 | Murahmin | PENGADMINISTRASI UMUM | 400.000 |
| 2.C. UPTD KESEHATAN PUSKESMAS DOI - DOI | | | |
| 1 | SULEHA, S.ST | Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama | 227.600 |
| 2.D. UPTD KESEHATAN PUSKESMAS MANGKOSO | | | |
| 1 | dr. ISMAINI | Dokter Madya | 310.750 |
| 2 | dr. BESSE WADENG | Dokter Muda | 372.400 |
| 3 | MUHAMMAD HEIDIR, SKM | Pengelola Kepegawaian | 400.000 |
| 4 | ROSNAINI, A.M. Keb | Bidan Pelaksana Lanjutan | 13.350 |
| 2.E. UPTD KESEHATAN PUSKESMAS MADELO | | | |
| 1 | dr. H. Amir | Dokter Muda | 372.400 |
| 2 | Dewi Kasmayani, S.Kep | Perawat Muda | 217.950 |
| 3 | Patimah, Amd. Keb | Bidan pelaksana Lanjutan | 13.350 |
| 2.F. UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PALAKKA | | | |
| 1 | Hj.Nur Jannah.SKM,M.Kes | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 217.950 |
| 2 | dr. Wahyuddin Adam | Dokter Madya | 310.750 |
| 2.G. UPTD KESEHATAN PUSKESMAS RALLA | | | |
| 1 | Saparuddin.SKM.M.Kes | Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas | 48.100 |
| 2 | dr. NURWAHIDA | Dokter Muda | 372.400 |
| 3 | KASMAWATI, S.Kep.Ns | Perawat Ahli Muda | 127.950 |
| 2.H. UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PUJANANTING | | | |
| 1 | WAHIDAH,SKM.M.Adm.Kes | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 377.650 |
| 2.I. UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PANCANA | | | |
| 1 | MAKMUR, S.Sos.M.Kes | Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas | 48.100 |
| 2 | dr. H. ROHMAN | Dokter Madya | 310.750 |
| 3 | KUMALASARI, SKM | Perawat Penyelia | 234.200 |
| 4 | MAGFIRAH, SKM | Sanitarian Muda | 200.000 |
| 2.J. UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PADONGKO | | | |
| 1 | dr. A. THAHIRAH | Dokter Madya | 310.750 |
| 2 | Hj. ALYANI, SKM | Nutrisionis Madya | 143.100 |
| 3 | KASMAH, Amd. Keb | Bidan Pelaksana Lanjutan | 13.350 |
| 4 | MASRIANA, Amd. Keb | Bidan Pelaksana Lanjutan | 13.350 |
| 2.K. UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PEKKAE | | | |
| 1 | H.TASWI ,S.Farm.Apt | Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas | 48.100 |
| 2 | dr. HASPIANA SAHRUDDIN | Dokter Madya | 310.750 |
| 3 | HARISAH ,AMH | Pengelola Penggerak peran serta Masyarakat di bidang Kesehatan | 400.000 |

v

| NO | NAMA | NAMA JABATAN | JUMLAH TPP LAINNYA (Rp) |
|---|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.L. UPTD KESEHATAN PUSKESMAS LISU | | | |
| 1 | dr.ALFI SYAHR | Dokter Muda | 372.400 |
| 2 | NASRIANI AZIS,AMd.Keb | Bidan Pelaksana Lanjutan | 13.350 |
| 3 | RAHMADSYAH | Pengadministrasi Umum | 400.000 |
| 3. RSUD BARRU | | | |
| 1 | dr. AMIS | Dokter Madya (Direktur RSUD) | 4.421.050 |
| 2 | MUHAMMAD HATTA, SKM,M.Kes | Kasubag Keuangan | 1.068.100 |
| 3 | SUARNI | Pengelola Gaji | 250.000 |
| 4 | SULTAN | Bendahara | 400.000 |
| 5 | UMMUAEMAN, SKM | Pengelola Program dan Kegiatan | 1.100.000 |
| 6 | MUHAMMAD YUSUP, SKM | Pengelola Program dan Kegiatan | 42.300 |
| 7 | MUALLIM, AMKG | Perawat Gigi Penyelia/Pengurus Barang | 824.200 |
| 8 | HARIADI, Amd.Tem | Teknisi Elektromedik Pelaksana Lanjutan/Pembantu Pengurus Barang | 200.000 |
| 9 | dr.Hj. A.Nikmawati, DEA., Sp.PK.,M.Kes | Dokter Madya | 5.040.750 |
| 10 | dr.H. Syamsuddin, Sp.PD.FINASIM | Dokter Madya | 5.040.750 |
| 11 | dr. Muh. Herman, Sp.Rad.,M.Kes | Dokter Ahli Madya | 5.040.750 |
| 12 | dr. Nurkhairaty | Dokter Madya | 5.040.750 |
| 13 | drg.Wahdaniyah Masdy, Sp.KG | Dokter Gigi Madya | 5.040.750 |
| 14 | dr. Erna Heryani, M.Kes, Sp.S | Dokter Madya | 5.040.750 |
| 15 | dr.Marani, Sp.GK.,M.Kes | Dokter Madya | 5.040.750 |
| 16 | dr. Mardelina, Sp.THT,M.Kes | Dokter Muda | 5.941.160 |
| 17 | drg. Hastin Sofyana, Sp.PM | Dokter Gigi Muda | 5.712.400 |
| 18 | dr. Citra Dewi | Dokter Muda | 5.712.400 |
| 19 | | Dokter | 5.712.400 |
| 20 | dr.Yusrianty D | Dokter Muda | 5.712.400 |
| 21 | dr. Suriadi Nurdin, Sp.B | Dokter Muda | 5.712.400 |
| 22 | | Dokter | 5.712.400 |
| 23 | | Dokter | 5.712.400 |
| 24 | dr. Amiruddin, Sp.OG | Dokter Muda | 5.712.400 |
| 25 | dr. Indah Burdang | Dokter Muda | 5.712.400 |
| 26 | dr. Wira | Dokter Muda | 5.712.400 |
| 27 | dr. Muh. Iqbal | Dokter | 6.177.900 |
| 28 | | Dokter | 5.712.400 |
| 29 | | Dokter | 5.712.400 |
| 30 | dr. Andi Risiko Amalia | Dokter Muda | 5.712.400 |
| 4. DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG | | | |
| 1 | | Kepala Dinas | 3.689.550 |
| 2 | Drs. BAHARUDDIN | Sekretaris Dinas | 1.777.050 |
| 3 | ESRON | Pengelola Program dan Kegiatan | 200.000 |
| 4 | SYAHRUDDIN, A.Md | Pengelola Monitoring dan Evaluasi | 182.300 |

| NO | NAMA | NAMA JABATAN | JUMLAH TPP LAINNYA (Rp) |
|--|---------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | H.HAERUDDIN, SE | Bendahara | 1.500.000 |
| 6 | GUMANTI | Pengelola Gaji | 250.000 |
| 7 | SUDIRMAN USMAN, S.Sos | Pranata Barang dan Jasa | 1.000.000 |
| 8 | HAMALIAH, SE | Pengadministrasi Umum | 200.000 |
| 9 | A. SANDY MULAPUTRA, SE,MM | Kepala Seksi Peralatan | 303.333 |
| 10 | SYAMSIDAR, ST | Analisis Bangunan Gedung dan Pemukiman | 103.333 |
| 11 | M. NACHRUN, ST | Penyusun Rencana Tata Ruang | 103.333 |
| 5. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | | | |
| 1 | MOH.FADLY.R.FAWAE,S.IP,M.Si | Kepala Dinas | 3.689.550 |
| 2 | MASKURNIAWAN, ST | Pengelola Program dan Kegiatan | 200.000 |
| 3 | H. MUHIDDIN, SE | Bendahara | 900.000 |
| 4 | KARTINI | Pengelola Gaji | 366.667 |
| 5 | IMAM FIRMANSYAH, ST | Analisis Perumahan | 82.859 |
| 6 | MURSAL, ST | Kasi Air Bersih dan Sanitasi | 200.000 |
| 7 | IMRAN SUTAR | Pemelihara Penerangan Jalan | 400.000 |
| 8 | BAHARUDDIN | Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan | 200.000 |
| 6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | | | |
| 1 | | Kepala Satuan | 3.689.550 |
| 2 | Drs. RUSDI | Sekretaris | 637.050 |
| 3 | JAMAL, S.Sos | Bendahara | 650.000 |
| 4 | ISHAK | Pranata Barang dan Jasa | 742.300 |
| 7. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| 1 | Drs.Wardan | Kepala Badan Kesbangpol | 3.689.550 |
| 2 | | Sekretaris | 1.167.050 |
| 3 | Hasanuddin, S.Sos | Kasubag Program | 528.100 |
| 4 | Hj. Irappe | Kasubag Keuangan | 328.100 |
| 5 | Muhammad | Bendahara | 550.000 |
| 6 | Hj. Nurdiah, S.Sos | Bendahara Gaji | 542.300 |
| 7 | Suryawati Jamaluddin, S.IP,M.AP | Kasubag Umum | 534.100 |
| 8 | Muh. Taupik. S | Penata Barang dan Jasa | 650.000 |
| 9 | Usman, SE | Pengola Surat | 292.300 |
| 10 | Drs. Muhammad Jufri | Kepala Bidang Manajemen Konflik | 380.150 |
| 11 | Dra. Hj. Syamsural, MM | Kasubid Penanganan Konflik dan Ketahanan Nasional | 328.100 |
| 12 | Asniwali syam,S.Sos | Kasubid Deteksi Dini dan Analisis Potensi Konflik | 328.100 |
| 13 | Hj.Endang Susilawati, SE, MM | Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Politik | 260.150 |

| NO | NAMA | NAMA JABATAN | JUMLAH TPP LAINNYA (Rp) |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Hj. Mardawati S.Sos, M.AP | Kasubid Pengembangan Etika Buadaya Politik dan Kemasyarakatan | 328.100 |
| 14 | Dahlan,A. S.Sos | Kasubid Wawasan Kebangsaan, Ideologi dan Kewaspadaan Nasional | 250.000 |
| 8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | |
| 1 | Hj. SITI NASRIAH MAJID, SH. MH | Kepala Badan | 3.689.550 |
| 2 | AGUSTIAR,ST | Kepala Sub Bagian Program | 224.100 |
| 3 | MUNIRAH MAMMA,ST | Kepala Sub Bagian Keuangan | 518.100 |
| 4 | SURIATI | Bendahara | 550.000 |
| 5 | Hj. NURMAYA, S. Sos. | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Negara | 700.000 |
| 6 | HASNINDANG | Pengurus Gaji | 250.000 |
| 7 | HARTAWAN,S.Sos | Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 170.150 |
| 8 | H. IBRAHIM, S. Sos. | Kepala Seksi Pencegahan | 118.100 |
| 9 | ABDUL MUHAEMIN HASAN,S.Sos | Kepala Seksi Kesiapsiagaan | 218.100 |
| 10 | MAKKULAU, S.Sos | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik | 176.150 |
| 11 | I S H A K, ST. | Kepala Seksi Kedaruratan | 512.500 |
| 12 | A. HASANUDDIN, ST. | Analisis Mitigasi Bencana | 256.300 |
| 9. DINAS SOSIAL | | | |
| 1 | ANDI MAKMUN, SE, M. Si | Kepala Dinas | 3.689.550 |
| 2 | ANDI MUH. TAMAR, S. Sos, MM. Pu | Sekretaris | 917.050 |
| 3 | Hj. NURWAHIDA, S. Sos | Kasubag Program & Keuangan | 161.100 |
| 4 | ASTUTI | Bendahara | 550.000 |
| 5 | ANNIHAYA RAUF, S. Sos | Bendahara Gaji | 250.000 |
| 6 | FATIMAH | Pengelola Kepegawaian | 1.032.300 |
| 7 | MUKARRAMAH, S.IP | Kasi Rehsos Tuna Susila | 47.650 |
| 8 | RIDWAN N, S. Sos | Kasi Bantuan Advokasi & Perlindungan Sosial | 98.100 |
| 9 | DARMIATI A. MUHAMMAD, S.Sos | Analisis Advokasi | 33.333 |
| 10 | ANDI FACHRIANI PAWELLOI, S. ST | Pengelola Perlindungan Sosial | 320.833 |
| 11 | ADOLFINA LAPIK, S. Sos | Kasi Bantuan Sosial & Korban Bencana | 247.650 |
| 12 | SYAMSURIADI | Pengelola Data Bantuan Sosial | 287.500 |
| 10, DINAS KETAHANAN PANGAN | | | |
| 1 | Ir. ANDI SIDDA | Kepala Dinas | 3.689.550 |
| 2 | Drs. H. ISHAK ILYAS | Sekretaris | 537.050 |
| 3 | ALWIDDIN, S.Sos | Bendahara | 550.000 |
| 4 | Hj. HASNAH | Pengelola Gaji | 250.000 |
| 5 | MUHAMMAD ARIJAL | Pranata Barang dan Jasa | 900.000 |
| 11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 1 | Drs.MUHAMMAD TAUFIK MUSTAFA. M.Si | Kadis | 3.689.550 |

| NO | NAMA | NAMA JABATAN | JUMLAH TPP LAINNYA (Rp) |
|--|--------------------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | MUHAMMAD USULUDDIN | Sekretaris | 573.050 |
| 3 | WIWIN SETIAWAN. ST | Kepala Sub Bagian Program | 48.100 |
| 4 | FAHMI TALIB | Pengelola Barang & Jasa | 700.000 |
| 5 | HARIDA MUSPITAWATI | Bendahara | 533.441 |
| 6 | KARTINI. S | Pengelola Gaji | 250.000 |
| 7 | NURHAYATI,ST.M.Si | Kasi Inventarisasi Rpplh Dan Klhs | 73.100 |
| 12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| 1 | HJ. ANDI RACHMAWATY, SE | Kepala Dinas | 3.689.550 |
| 2 | Drs. MUHAMMAD NUNG | Sekretaris | 737.050 |
| 3 | HARIS NASUTION, S.Kom | Kasubag Program dan Keuangan | 68.100 |
| 4 | TITIN SUMARNI, A.Md, Kom | Bendahara | 756.300 |
| 5 | NASMA, S.Sos | Pengelola Gaji / Pengelola TPP | 392.300 |
| 6 | AMINAH | Pranata Barang dan Jasa | 742.300 |
| 7 | SAFRI | Pengadministrasi Kependudukan | 48.300 |
| 8 | SAHRIANA | Pengelola Mutasi Penduduk | 42.300 |
| 9 | SRI SASTRAWATI, S. Pd | Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 150.000 |
| 10 | ANDI TENRI ATU, SE | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | 120.150 |
| 11 | HJ. MURNIATI, S.Sos | Kasi Kelahiran | 118.100 |
| 12 | JAMAL BASRI, A.Md, Kom | Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 150.000 |
| 13 | Dra Hj. NURASIAH | Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian | 68.100 |
| 14 | ROSMAWATI | Pengadministrasi Kependudukan | 150.000 |
| 15 | FAHRUL SYAM AGUNG | Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | 150.000 |
| 16 | KAHARUDDIN, A.Ma | Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 56.300 |
| 17 | NURDIANA | Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi | 42.300 |
| 13. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, | | | |
| 1 | Drs. NASARUDDIN, M.Si | Kepala Dinas | 3.689.550 |
| 2 | JAMALUDDIN, S.Sos, MH | Sekretaris | 2.106.050 |
| 3 | FAJAR, S.Sos | Kepala Sub Bagian Program | 188.100 |
| 4 | SRIYANTI SAHRIR, SE | Bendahara | 650.000 |
| 5 | ASHBIYAH, S.Sos | Pengelola Gaji | 250.000 |
| 6 | HUSPIRA S, S.Sos | Pranata Barang dan Jasa | 900.000 |
| 7 | ADAM BACO, SE | Kabid Pemdes | 740.150 |

| NO | NAMA | NAMA JABATAN | JUMLAH TPP LAINNYA (Rp) |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | BAZO ZAINUDDIN, S.Sos | Kasi Kelembagaan Pemdes dan Pengembangan SDM Aparat Desa | 478.100 |
| 9 | ALAMSYAH, S.Sos | Pengadministrasi Umum | 358.333 |
| 10 | MUDDATSIR HASAN, S.Sos | Kasi Administrasi Dan Evaluasi Perkembangan Desa | 478.100 |
| 11 | INA MUALIAH, SE | Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemdes | 291.667 |
| 14. DINAS PERHUBUNGAN | | | |
| 1 | ANDI ADNAN AZIS, S.STP.M.Si | Kepala Dinas | 3.689.550 |
| 2 | Drs. JALIL A. MAPPIARE | Sekretaris | 637.050 |
| 3 | MUH.NURHATIP,S.Kom | Bendahara Pengeluaran | 650.000 |
| 4 | SARKIAH | Bendahara PAD | 400.000 |
| 5 | ASHAR | Pengelola Gaji | 250.000 |
| 6 | IRWAN ANAS | Pranata Barang dan Jasa | 700.000 |
| 7 | SUARNO SAKBAR,ST | Pengembang Sarana dan Prasarana | 200.000 |
| 15. DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK | | | |
| 1 | | Kepala Dinas | 3.689.550 |
| 2 | ABDUL RAHIM,S.IP,M.Si | Sekretaris | 917.050 |
| 3 | ARHANUDDIN | Bendahara | 46.300 |
| 4 | ASWAR | Pengelola Gaji | 250.000 |
| 5 | MUHAMMAD AZHAR ANWAR,S.STP | Kabid.Informasi dan Komunikasi Publik | 580.150 |
| 6 | AKHMAD, SS | Kasi. Pengelolaan Media Publik | 648.100 |
| 7 | MURSAL, SE | Pengelola Data Statistik | 512.300 |
| 16. DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN | | | |
| 1 | ANDI TAKDIR,SE.,M.Si | Kepala Dinas | 6.189.550 |
| 2 | MUHAMMAD KILAT,SE | Sekretaris | 1.037.050 |
| 3 | ASNI DAMAYANTI D, S.Si | Kasi. Program & Keuangan | 168.100 |
| 4 | MUHAMMAD IDRIS | Bendahara | 750.000 |
| 5 | H. AL'AZHAR, S.Sos | Pengelola Gaji & Admin Tpp | 250.000 |
| 6 | FATIMAH | Pengelola Pemanfaatan Barang Dan Jasa | 850.000 |
| 7 | H.SABIRIN,S.Sos.,M.Si | Kabid. Koperasi | 116.667 |
| 8 | FACHRUL ZULFIKAR D, ST | Analisis Koperasi | 73.612 |
| 9 | SUWARNI SYAM | Pengelola Pengembangan Masyarakat | 73.612 |
| 10 | H. KAMARUDDIN, SE | Kasi.Usaha Sarana Dan Distribusi | 83.334 |
| 11 | FAISAL, SE | Analisis Perdagangan | 266.300 |
| 12 | SUDIRMAN, A.Md | Pengelola Fasilitas & Mediasi Perlindungan Konsumen | 51.390 |
| 13 | MUHAMMAD ADNAN HALIM DAUD | Pengelola Mutu | 26.390 |

| NO | NAMA | NAMA JABATAN | JUMLAH TPP LAINNYA (Rp) |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA (DPMPTSPTK) | | | |
| 1 | SYAMSIR, S. IP, M.Si | Kepala Dinas | 3.689.550 |
| 2 | Drs. H. SAFRUDDIN, M. Si | Sekretaris | 644.000 |
| 3 | MUHAMMAD ACHMAD AMINUDDIN, A.md | Bendahara | 550.000 |
| 4 | ROSMAWATI ISKANDAR,S.E | Pengelola Gaji | 250.000 |
| 5 | HALISA YA'KUB, A.Md | Pengelola Laporan Keuangan | 200.000 |
| 6 | ANDI ARNISA,A.Md | Pranata Barang dan Jasa | 312.300 |
| 7 | ARAFAH | pengadministrasian Umum | 200.000 |
| 18. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | |
| 1 | Drs. MUHAMMAD ANWAR, M. Si | Kepala Dinas | 3.689.550 |
| 2 | MUHAMMAD SABIRIN, S.Sos | Sekretaris | 567.050 |
| 3 | ANDI KHAERANA RIYU, A.Md | Bendahara | 550.000 |
| 4 | RUSLINAWATI, A.Md | Pengelola Gaji | 250.000 |
| 5 | ASRI RAHAYU ANAS, A.Md | Pranata Barang dan Jasa | 900.000 |
| 6 | ISMAIL MARZUKI | Pengadministrasi Umum/Bend.Penerima | 200.000 |
| 19. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | |
| 1 | Drs. FARIADI | Kepala Dinas | 3.689.550 |
| 2 | H. WIRAWAN JAYA, SE, M.I.Kom | Kasubag Program | 200.000 |
| 3 | SYAHRIAH, S. Sos | Bendahara | 540.000 |
| 4 | ROSDIANA, S. Sos | Pengelola Gaji | 250.000 |
| 5 | ST. NURMIAH, SH | Kasubag. Umum dan SDM | 548.100 |
| 6 | UMMU KALSUM, S. Si | Pranata Barang dan Jasa | 700.000 |
| 20. DINAS PERIKANAN | | | |
| 1 | Ir. ANDI SIDDA | Kepala Dinas | 3.689.550 |
| 2 | Drs. ANSHAR TAHIR, M.Si | Sekretaris | 637.050 |
| 3 | WAHYUDI | Pengelola Program & Kegiatan | 200.000 |
| 4 | SUPRATMAN, S.Pi | Bendahara | 650.000 |
| 5 | KANAWIAH, A.Md.Pi | Pengelola Gaji | 250.000 |
| 6 | ARNIATI, S.Pi | Pranata Barang dan Jasa | 700.000 |
| 7 | ANDI PAMESSANGI, S.Pi | Analisis Kenelayaan | 66.667 |
| 8 | MUH. IBRAHIM, S.Sos | Kabid. Perizinan & Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 400.000 |
| 21. DINAS PARIWISATA | | | |
| 1 | ANDI SYARIFUDDIN, S.IP, M,Si 1970 | Kepala Dinas | 3.689.550 |
| 2 | Drs. WAHYUDDIN | Sekretaris | 567.050 |
| 3 | ANDI MUZZAMMIL, S.Pt | Kepala Sub Bagian Program | 68.100 |
| 4 | RATNAWATI SUYUTI | Bendahara | 550.000 |
| 5 | HASNAH HADE | Pengelola Gaji | 250.000 |
| 6 | ANDI NINNONG | Pengelola Laporan Keuangan | 200.000 |
| 7 | KURNIADI, SS | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 700.000 |
| 22. DINAS PERTANIAN | | | |
| 1 | | Kepala Dinas | 3.689.550 |
| 2 | drh. H. MA' RUF, S. KH | Sekretaris Dinas | 864.050 |

| NO | NAMA | NAMA JABATAN | JUMLAH TPP LAINNYA (Rp) |
|---|---------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | H. HASYIM NUR, S. Sos | Kepala Sub Bagian Program | 598.100 |
| 4 | MARYAULFA, S.P., M.P. | Pengelola Program dan Kegiatan | 200.000 |
| 5 | NURHAEDAH, S. Si., MM | Kepala Sub Bagian Keuangan | 198.100 |
| 6 | MARDAWIAH | Pengelola Gaji | 250.000 |
| 7 | DAH RIZKY PARDANI JUNAEDI, S. S | Bendahara | 750.000 |
| 8 | ABD. JABBAR, S. Sos | Pranata Barang dan Jasa | 758.333 |
| 9 | FAUZIAH, S.P. | Kepala Bidang Prasarana dan Sarana | 130.150 |
| 10 | VIRQANA, S.P. | Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan | 188.100 |
| 11 | DWI RAHAYU MURNI, S.P. | Analisis Investasi dan Permodalan Usaha | 76.300 |
| 12 | TAKDIR YUSUF | Pengelola Irigasi | 400.000 |
| 13 | MUHAMMAD SADAR, S. ST | Penguji Coba Perbibitan dan Perbenihan | 375.000 |
| 14 | ANDI SAHRIANI, S.P., M. Si | Kasi. Pengelohan dan Pemasaran Tanaman Pangan | 98.100 |
| 15 | HJ. SITTI DINAR, S. Sos | Kasi. Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura dan Perkebunan | 300.000 |
| 16 | SITTI RUGAIYAH, S. Sos | Penyusun Rencana Bahan Teknis Perbenihan | 100.000 |
| 17 | FITRI IRIANA, S. KOM., M. Si | Kepala Seksi Produksi Hortikultura dan Perkebunan | 398.100 |
| 18 | MARDIA | Pengadministrasi Umum | 100.000 |
| 19 | Ir. TAUFIK ASYKAL, M. Si | Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 32.150 |
| 20 | NURJADID ALWI, S.Pt. MM | Kasi. Pembibitan dan Produksi Peternakan | 148.100 |
| 21 | HJ. HASNAWIAH P, BA | Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluhan | 58.333 |
| 22 | FATMAWATI, S. H | Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluhan | 6.433 |
| 22.A. PENYULUH PERTANIAN BPP PUJANANTING | | | |
| 1 | ABDUL HAYAT, S.P. | Penyuluh Pertanian Madya | 160.100 |
| 22.B. PENYULUH PERTANIAN BPP TANETE RIAJA | | | |
| 1 | ALIMUDDIN, S.P. | Penyuluh Pertanian Madya | 160.100 |
| 22.C. PENYULUH PERTANIAN BPP TANETE RILAU | | | |
| 1 | SUBHAN, S. ST | Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan | 265.450 |
| 22.D. PENYULUH PERTANIAN BPP BALUSU | | | |
| 1 | MUHABBAR, S.P. | Penyuluh Pertanian Muda | 160.100 |
| 22.E. PENYULUH PERTANIAN BPP SOPPENG RIAJA | | | |
| 1 | HERMAN, S. ST | Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan | 265.450 |

v

| NO | NAMA | NAMA JABATAN | JUMLAH TPP LAINNYA (Rp) |
|---|---------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22.F. PENYULUH PERTANIAN BPP MALLUSETASI | | | |
| 1 | ANDI BAHTIAR, S.TP | Penyuluh Pertanian Muda | 160.100 |
| 23. SEKRETARIAT DAERAH | | | |
| 23.A. BAGIAN UMUM | | | |
| 1 | A. RUSMAN RUSTAM, S.STP., M.Si. | Kepala Bagian | 1.921.050 |
| 2 | AZHAR HAMID, S. IP., M.Si. | Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan | 148.100 |
| 3 | MIRWAN, S. Sos. | Analisis Keuangan | 600.000 |
| 4 | WAHYUDDIN L | Pengelola laporan Keuangan | 866.667 |
| 5 | SATRIAWAN | Pengelola laporan Keuangan | 1.000.000 |
| 6 | YUSRI | Pengelola laporan Keuangan | 400.000 |
| 7 | RUSLIDIN, S.Sos | Pengelola laporan Keuangan | 400.000 |
| 8 | HAERIAH, SM | Bendahara | 956.300 |
| 9 | RUSNAENI, SM | Pengelola Gaji | 250.000 |
| 10 | SUGIARTO, SH, M.A.P | Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga & Perlengkapan | 456.300 |
| 11 | RAFIKA, SM | Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga & Perlengkapan | 366.300 |
| 12 | MUHAMMAD ARIEF, S.STP. | Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga & Perlengkapan | 706.300 |
| 13 | IRWAN JAYA, S.Sos | Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas | 162.300 |
| 14 | Hj. ERNI MULYANI, S.Sos | Pengadministrasi Umum | 600.000 |
| 15 | MULIADI | Pengadministrasi Umum | 616.667 |
| 16 | MARWADI | Pengadministrasi Umum | 700.000 |
| 17 | | Kepala Sub Bagian Pengelola Mes Pemda | 1.368.100 |
| 18 | EKA PRAYUWANTI AMAD, SE | Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas | 1.000.000 |
| 19 | SUHERMAN, A.Md | Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas | 100.000 |
| 20 | YAN PRANAJAYA, A.Md | Pengadministrasi Umum | 1.000.000 |
| 23.B. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTODA | | | |
| 1 | H. ANDI AMIRUDDIN RUM, SE | Kepala Bagian | 1.921.050 |
| 2 | IMRAN H. ISKANDAR, S.IP, MH | Kasubag. Koordinasi Urusan Pemerintahan | 958.100 |
| 3 | RATHI NUROCTAVIA, S.STP | Kasubag. Kerjasama dan Otoda | 1.847.650 |

| NO | NAMA | NAMA JABATAN | JUMLAH TPP LAINNYA (Rp) |
|--|------------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | DEWI SUSANTI | Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 1.022.300 |
| 5 | AZRINA MUSTAKIM | Pengadministrasi Umum | 566.667 |
| 6 | ANDI IKBAR | Pengadministrasi Umum | 48.300 |
| 23.C. BAGIAN HUKUM | | | |
| 1 | Hj.NAIDAH, SH. | Kepala Bagian Hukum Setda Baru | 4.321.050 |
| 2 | ISMA KURNIATY,M, SH.MH | Kasubag Bantuan Hukum Dan Tindak Lanjut Setda Baru | 847.650 |
| 3 | ARMAWATY | Pengadministrasian Umum | 48.300 |
| 4 | A. ROSWATI DG, SANGA, S.H., M.A.P. | Kasubag Dokumentasi Dan Penyuluhan Hukum Setda Baru | 447.650 |
| 5 | NURILAH, S.Sos | Pengelola Data Informasi dan Hukum | 42.300 |
| 6 | ARDI SUSANTO, SH. | Kasubag Perundang - Undangan Setda Baru | 3.087.650 |
| 7 | ALAMSYAH RAHIM | Pengadministrasian Umum | 598.300 |
| 23.D. BAGIAN ORGANISASI | | | |
| 1 | A. SYUKUR MAKKAWARU, S.STP, M.S | Kepala Bagian | 921.050 |
| 4 | NUR ASMI B, S.Sos | Analisis Jabatan | 500.000 |
| 23.E. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL | | | |
| 1 | YOSSI FEBRISIA, S.STP, M.Si | Kepala Bagian | 921.050 |
| 2 | ANDI MAYA NOVITASARI, S.STP | Kasubag Humas | 468.100 |
| 3 | NASHRULLAH, S.Sos, M.I.Kom | Kasubag Data dan Informasi | 68.100 |
| 4 | REZA SYAHRIAL, S.STP | Analisis Humas dan Protokol | 1.316.667 |
| 5 | FATIAH ISTIANI MAULA, S.STP | Analisis Humas dan Protokol | 400.000 |
| 23.F. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | |
| 1 | H. ANDI UNRU, ST, MSP | Kepala Bagian | 1.921.050 |
| 2 | GUSTAN, SE | Kasubag Monitoring dan Evaluasi Pembangunan | 1.183.333 |
| 3 | GUNAWAN WIBISONO, S.Kom | Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Pengendalian Program | 1.040.100 |
| 4 | HJ. YUSNANI YUNUS, S.Kom | Kasubag Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan | 1.183.333 |
| 5 | SITTI AMINAH TANG, S.Sos, M.A.P | Analisis Program Pembangunan Sub Bagian Bina Program | 1.183.333 |
| 6 | BHISMA SETYA LAKSANA | Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan | 1.214.300 |
| 7 | ANDI ERNI JAYA | Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan | 1.183.333 |

Y

| NO | NAMA | NAMA JABATAN | JUMLAH TPP LAINNYA (Rp) |
|---|------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | FAISAL | Pengadministrasi Umum Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Pengendalian | 1.183.333 |
| 23.G. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA | | | |
| 1 | | Kepala Bagian | 921.050 |
| 2 | Hj. HERLINA ZAINUDDIN, S.Sos | Kasubag. Sumber Daya Alam | 47.650 |
| 3 | H. JAYANTO SABIR, SE | Kasubag. Koordinasi Penanaman Modal BUMD | 247.650 |
| 4 | Hj. SRI MUSFIRAH, S.Pt | Kasubag. Perekonomian | 47.650 |
| 5 | RUSLI MARE, S.Sos | Penyusun Program Pengawasan Perekonomian | 356.300 |
| 6 | MUHAMMAD NASARUDDIN | Pengadministrasi umum | 48.300 |
| 23.H. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | |
| 1 | Dr. IRHAM, S.Ag,M.Ag. | Kepala Bagian | 921.050 |
| 2 | SYAHRIADI, S.HI, MA | Kepla Sub Bagian Kerukunan Umat Beragama | 47.650 |
| 3 | M. AHMAD RIDHA, S.Sos, M.A.P | Kepala Sub Bagian Kesehatan, Sosial, P2KB dan P3A | 68.100 |
| 4 | SITTI HALIJAH, S.Ag | Analisis Pendidikan | 200.000 |
| 5 | HASNI SOFIAN, S.Sos | Analisis Sosial Budaya | 56.300 |
| 23.I. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | |
| 1 | ALIMUDDIN, S.Sos, M.A.P | Kepala Bagian | 3.993.050 |
| 2 | ANDI HASRAN DAFIR, ST | Kasubag. Pengadaan Barang dan Jasa | 4.100.000 |
| 3 | RAHMAN JUDRIAHN ST., MT | Analisis Pengadaan Barang dan Jasa | 4.100.000 |
| 4 | BENNY BASO SOPHIAN | Pranata Barang dan Jasa | 842.300 |
| 5 | MUHAMMAD ASIS, H, ST | Kasubag. Evaluasi Pelaporan dan Administrasi | 4.100.000 |
| 6 | AMIRUDDIN S,ST., MT | Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan | 4.100.000 |
| 7 | NARMIA | Pengelola Monitoring dan Evaluasi | 1.192.300 |
| 8 | ANNI SARI, ST, M.AP | Kasubag.Pembinaan Pengadaan | 768.100 |
| 9 | SABIR, S. Sos | Analisis Pengembangan SDM Aparatur | 4.100.000 |
| 10 | MUHAEMIN | Pengadministrasi Umum | 248.300 |
| 24. SEKRETARIAT DPRD | | | |
| 1 | | Sekretaris DPRD | 3.689.550 |
| 2 | IRHAM S,SE.MM | Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan | 200.000 |
| 3 | SYAMSURIYANI,S.SOS | Pranata Barang dan Jasa | 700.000 |
| 4 | ALI ABDILLAH,S,S.STP | Kabag.Keuangan | 692.300 |
| 5 | FARID MUHIDDIN | Bendahara | 750.000 |
| 6 | SAIDAH ALI,S.Sos | Pengelola Gaji Set.DPRD | 250.000 |

| NO | NAMA | NAMA JABATAN | JUMLAH TPP LAINNYA (Rp) |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | NURBAYA,S.SOS | Pengelola Data Laporan Keuangan | 93.750 |
| 8 | NURLINDA,S.Sos | Pengelola Peraturan Perundang-Undangan | 22.300 |
| 25. KANTOR KECAMATAN BARRU | | | |
| 1 | Hj. A. HILMANIDA, S.STP, M.Si | Camat | 1.251.050 |
| 2 | SYARIEF AMRULLAH SADIRA, S.STP | Sekcam | 620.300 |
| 3 | MAHRUNG | Bendahara | 662.500 |
| 4 | AYYUB | Pengelola Gaji | 262.500 |
| 5 | MILA KARMILA | Pengelola Kepegawaian | 150.000 |
| 6 | ERWIN, S.Sos | Penata Barang dan Jasa | 712.500 |
| 7 | JOHAR | Pengadministrasi Umum | 12.500 |
| 8 | SULEHA, S.Sos | Analisis Pemerintah Daerah | 12.500 |
| 9 | LA SUPU | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 150.000 |
| 10 | PARMAN PARAJA | Pengadministrasian Umum | 12.500 |
| 11 | JUNIATI, S.Sos | Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 12.500 |
| 12 | ANDI MARWATI | Bendahara | 250.000 |
| 13 | A.MARWAN | Pranata Barang dan Jasa | 400.000 |
| 14 | ARIFAI,S.Sos | Bendahara | 250.000 |
| 15 | SARTIANA | Pengelola Kepegawaian | 400.000 |
| 16 | AHMAD TIMA | Bendahara | 250.000 |
| 17 | NUR ALAM | Pengelola Pemberdayaan Masyarakat | 400.000 |
| 18 | FITRIYANI TAUFIK | Bendahara | 250.000 |
| 19 | MARIANA | Pengelola Pemberdayaan Masyarakat | 400.000 |
| 20 | HARPIKA AYU, A. Md | Pranata Barang dan Jasa | 400.000 |
| 21 | MUHAMMAD SABIR | Bendahara | 250.000 |
| 22 | ILHAM | Pranata Barang dan Jasa | 400.000 |
| 26. KANTOR CAMAT TANETE RILAU | | | |
| 1 | Drs.H.MUH.HUDRI,M.Si | Camat | 1.561.050 |
| 2 | | Sekretaris | 540.300 |
| 3 | AMILANOVITA | Bendahara | 550.000 |
| 4 | HJ. NURJANNAH,S.Sos | Pengelola Gaji | 250.000 |
| 5 | NASRIANI | Pranata Barang dan Jasa | 700.000 |
| 6 | A.WIKRA SANDJAYA, SH | Kasi Ketentraman dan Ketertiban | 800.000 |
| 7 | TASLIM | Bendahara Pembantu | 250.000 |
| 8 | WAHIDA | Pranata Barang dan Jasa | 400.000 |
| 9 | ERSINAWATI | Pengelola Keuangan/Bendahara Pembantu | 250.000 |

| NO | NAMA | NAMA JABATAN | JUMLAH TPP LAINNYA (Rp) |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | YUSRAN NAS | Pengelola Administrasi Pertanahan Desa Kelurahan dan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | 400.000 |
| 27. KANTOR CAMAT TANETE RIAJA | | | |
| 1 | MUSAKKIR, S.Sos.M.Si | Camat | 1.551.050 |
| 2 | ARISTO SHIDDIQ,SH, MH | Sekretaris Camat | 516.300 |
| 3 | NURASMA, S.Sos | Bendahara | 550.000 |
| 4 | SUDIRMAN | Pengelola Gaji | 250.000 |
| 5 | SYAHRIBULAN | Parnata Barang dan Jasa | 700.000 |
| 6 | ANWAR M, BA | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | 14.850 |
| 7 | HERMAN | Pengelola Perangkat | 150.000 |
| 8 | AHMAD | Bendahara Pembantu Kelurahan | 250.000 |
| 9 | SITTI NURMIAH | Pengelola Program dan Kegiatan | 62.300 |
| 10 | | | |
| 11 | M. DAMIS, SE | Camat | 1.251.050 |
| 12 | TAKDIR | Pengadministrasi perencanaan dan program | 328.300 |
| 13 | LA ENRE, S.Sos | Bendahara | 450.000 |
| 14 | JUMARDIN | Pengelola Gaji | 250.000 |
| 15 | ABDUL JABBAR, A.Md | Bendahara Pembantu | 250.000 |
| 16 | SURIANI, S.Sos | Kasi Perekonomian dan pemberdayaan masyarakat | 227.650 |
| 29. KANTOR CAMAT BALUSU | | | |
| 1 | MAKHFUD, S.IP | Camat | 1.051.050 |
| 2 | MUHAJIR, SE | Sekretaris Camat | 440.300 |
| 3 | RAHMAT | Bendahara | 526.300 |
| 4 | RISMAYANTI | Pengelola Gaji | 250.000 |
| 5 | WARNI | Penata Barang dan Jasa | 700.000 |
| 6 | | Kasi Tata Pemerintahan | 14.850 |
| 7 | ABD. MUIN | Pengelola Perangkat Kecamatan | 150.000 |
| 8 | IBARDARMADI, S.IP | Lurah | 317.800 |
| | A.M.RIZALFAUZH, S.STP | Sekretaris Lurah | 400.000 |
| 9 | MUSTAFA | Bendahara | 250.000 |
| 30. KANTOR CAMAT SOP. RIAJA | | | |
| 1 | CHARLLY R.FISCHER,S.IP,M.Si | Camat | 1.311.050 |
| 2 | Drs. Andi Jaya | Sekretaris Camat | 540.300 |
| 3 | Musniyati Arfah, A.Md | Bendahara | 550.000 |
| 4 | Ramlah,S.Sos | Pengelola Gaji | 250.000 |
| 5 | Hasran | Pranata Barang Dan Jasa | 775.000 |
| 6 | Rahmi Suwaidy, SH | Sekretaris Lurah | 194.400 |
| 7 | Hijeriah,S.Sos | Bendahara | 250.000 |
| 8 | Irwan Jalil,SE | Pranata Barang dan Jasa | 400.000 |
| 31. KANTOR CAMAT MALLUSETASI | | | |
| 1 | Drs.H.NOMPO NASRUAN,MM | Camat | 821.050 |

| NO | NAMA | NAMA JABATAN | JUMLAH TPP LAINNYA (Rp) |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | SYARIFUDDIN,ST | Sekretaris | 634.300 |
| 3 | ABD. MALIK,S.Sos | Bendahara | 650.000 |
| 4 | SARRAPA | Pengelola Gaji / Pengelola Data Tpp | 250.000 |
| 5 | ANDI ALAMSYAH | Pranata Barang dan Jasa | 700.000 |
| 6 | MAHYUDDIN,SH | Kepala Seksi Tata Pemerinahan | 150.000 |
| 7 | Arham,S.Sos | Bendahara | 250.000 |
| 8 | Herawati Syamsuddin | Pranata Barang dan Jasa | 400.000 |
| 9 | Nurlaelah | Bendahara | 250.000 |
| 10 | Nurhaeda | Pranata Barang dan Jasa | 400.000 |
| 11 | Hasnawati | Bendahara | 250.000 |
| 12 | Andi Muhammad Sinrang | Pranata Barang dan Jasa | 400.000 |
| 32.. INSPEKTORAT DAERAH | | | |
| 1 | Drs.H.KAHARUDDIN,M.Si | Inspektur | 5.970.100 |
| 2 | SUAIB,SE | Sekretaris | 2.114.800 |
| 3 | KARTINI ZAINI, S.E., Ak., M.Si., C.A. | Kepala Sub Bagian Penyusunan Program | 318.100 |
| 4 | MASDANA, A.Md.Pi. | Pengelola Gaji | 250.000 |
| 5 | ASNI, S.H. | Kasubag Umum dan SDM | 200.000 |
| 6 | Hj. A. MELANY PERTAMASARI, S.Sos. | Bendahara | 550.000 |
| 33. BAPPEDA | | | |
| 1 | Dr. Ir. ABUSTAN, M.Si | Kepala Badan | 5.970.100 |
| 2 | UMAR. S, SKM, M. Kes | Sekretaris | 1.603.800 |
| 3 | STELLAWATI | Kepala Sub Bagian Program | 400.000 |
| 4 | NURMALASARI, SS | Bendahara | 726.300 |
| 5 | MUSMUALIM, S. Sos | Pengelola Gaji | 312.300 |
| 6 | H. KAMSIARA | Kepala Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia | 77.650 |
| 7 | Hj. A. DALAULENG, S.Sos | Pengelola Kepegawaian | 62.300 |
| 8 | NIMAH Z. HAMID, S.Sos | Pranata Barang dan Jasa | 800.000 |
| 9 | BURHAN | Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | 88.300 |
| 10 | Hj. SYAMSIAH, S.Sos | Pengadministrasi Umum | 88.300 |
| 11 | SYAMSUBAIRD SYARIFUDDIN, S.Si | Kepala Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah | 1.120.150 |
| 12 | ANDI ERNIA, ST | Kepala Subbidang Infrastruktur Wilayah | 166.667 |
| 13 | BASO ARTA, ST | Kepala Subbidang Perhubungan dan Perumahan | 666.667 |
| 14 | SUARDI AIDID, SE | Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah | 166.667 |
| 15 | ANDI IKA SYAMSU ALAM, S.STP, M.Si | Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam | 940.150 |

V

| NO | NAMA | NAMA JABATAN | JUMLAH TPP LAINNYA (Rp) |
|------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Ir. NASSER MUSA | Kepala Subbidang Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi | 100.000 |
| 17 | ANDI MUHAMMAD ILHAM, S.AP | Analisis Perencanaan | 176.300 |
| 18 | GISKAYANI, ST | Kepala Subbidang Keuangan, Penanaman Modal, dan Pariwisata | 100.000 |
| 19 | SITI AISYAH, SE | Kepala Subbidang Pertanian dan Lingkungan Hidup | 200.000 |
| 20 | MUH. AMIR, S. Pd, M. Pd | Kepala Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia | 420.150 |
| 21 | ANDI MULIANI, M, Si | Kepala Subbidang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia | 338.100 |
| 22 | RD. MUH. ALFAN H., SH | Analisis Perencanaan | 236.300 |
| 23 | ANDI NURAZISAH, SE | Kepala Subbidang Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat | 237.650 |
| 24 | MIRWAN, SH | Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Daerah dan Monev | 1.040.150 |
| 25 | NURBAYA, S, Pi | Kepala Subbidang Penelitian dan Pengkajian | 200.000 |
| 26 | KHAERUL ANWAR, SE | Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi | 417.650 |
| 27 | IDALAL, SE | Kepala Subbidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 166.667 |
| 34. BPKAD | | | |
| 1 | ABUBAKAR,S.Sos,M.Si | Kepala Badan | 8.470.100 |
| 2 | Drs.MUHAEMI,M.Si | Sekretaris | 4.553.800 |
| 3 | Hj.YUSRINI RAHAYU,SH | Kasubag Penyusunan Program | 1.877.650 |
| 4 | WEDYA RATNAWATI | Pengelola Monitoring & Evaluasi | 742.300 |
| 5 | H. MUHAMMAD NUR, SET | Kasubag Keuangan | 548.100 |
| 6 | ANDI PAISAL, S.E. | Bendahara BPKAD | 2.208.333 |
| 7 | FATIMAH, S.Sos. | Bendahara PPKD | 1.549.999 |
| 8 | BUNGAWALI, S.Sos. | Pengelola Gaji | 832.300 |
| 9 | HAMDANA,S.Sos. | Pengelola Laporan Keuangan | 782.300 |
| 10 | MUHAMMAD NADIR, S.I.P. | Kepala Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia | 1.391.666 |
| 11 | HAMKA | Pengelola Kepegawaian | 232.300 |
| 12 | MASHURI ABU | Pranata Barang dan Jasa | 1.282.300 |
| 13 | KUMALASARI, S.Sos. | Pengelola Surat | 416.666 |
| 14 | SITI RUSHAJATI | Pengadministrasi Umum | 116.667 |
| 15 | AHMAD ZAKIR, S.Sos | Kabid. Perencanaan & Anggaran | 4.280.150 |

v

| NO | NAMA | NAMA JABATAN | JUMLAH TPP LAINNYA (Rp) |
|-----------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | MUHAMMAD SUKRI, S.Sos. | Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Dan Analisa Anggaran | 1.648.100 |
| 17 | AGUS,S.Sos | Penyusun Rncana Keuangan | 3.316.300 |
| 18 | Hj.SANTI | Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan | 2.382.300 |
| 19 | ABDUL RAUF,S.E.,M.Si. | Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran | 1.648.100 |
| 20 | A S R A R | Penyusun Rncana Keuangan | 3.582.300 |
| 21 | USRIANTI | Pengelola Anggaran | 2.332.300 |
| 22 | SABAR | Kepala Sub Bidang Otorisasi | 1.648.100 |
| 23 | ASRIYADI | Penyusun Rncana Keuangan | 3.316.300 |
| 24 | DIANA SYAMSURYA | Verifikator Anggaran | 1.182.300 |
| 25 | AMRIAH | Pengelola Anggaran | 1.332.300 |
| 26 | SENI KARYAWATI, S.Sos. | Kepala Bidang Belanja Daerah | 4.280.150 |
| 27 | ANDI REMMANG, S.Sos. | Kepala Sub Bidang Perbendaharaan | 400.000 |
| 28 | SUARDI NASIR, S.Sos. | Pengolah Daftar Gaji | 2.258.333 |
| 29 | Hj. MUSFIRAH | Kepala Sub Bidang Kas Daerah | 400.000 |
| 30 | NILAWATI, S.Sos. | Pengolah Data Pencairan Dana | 762.300 |
| 31 | MARSUKI, S.E. | Pengolah Data Pencairan Dana | 900.000 |
| 32 | ROSMIJATI,S.E. | Kepala Sub Bidang Verifikasi | 447.650 |
| 33 | H.KHAERUDDIN | Verifikator Keuangan | 400.000 |
| 34 | A.RIRI HADI | Verifikator Keuangan | 1.100.000 |
| 35 | IRMAWATI MAJID | Verifikator Keuangan | 400.000 |
| 36 | DR. ANDI MUH. BATARA M, S.STP, M | Kepala Bidang Aset | 4.280.150 |
| 37 | | Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan | 1.403.650 |
| 38 | Hj. MINARNI, S.AP. | Kustodian Kekayaan Negara | 1.426.300 |
| 39 | MASRAN,SE | Kepala Sub Bidang Penggunaan, Pemusnahan dan Penghapusan | 1.753.650 |
| 40 | MANSUR. B | Kustodian Kekayaan Negara | 1.000.000 |
| 41 | AGUSSALIM, S.Sos. | Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pengamanan | 1.853.650 |
| 42 | MUHAMMAD HAMZAH, S.H. | Pengelola Barang Milik Negara | 1.266.300 |

| NO | NAMA | NAMA JABATAN | JUMLAH TPP LAINNYA (Rp) |
|--------------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 43 | KASMAWATI, S.Sos | Pengelola Barang Milik Negara | 2.066.300 |
| 44 | ADI WIJAYA, A.Md. | Kustodian Kekayaan Negara | 1.250.000 |
| 45 | Hj. SAMSIAR, SE | Kepala Bidang Akuntansi | 4.280.150 |
| 46 | | Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas | 1.568.100 |
| 47 | EVI TRISNAWATI, S.E., M.Si | Penyusun Laporan Keuangan | 1.666.666 |
| 48 | SRI WAHYUNI UMAR, A.MD. | Penyusun Laporan Keuangan | 1.716.300 |
| 49 | AKISMAN, S.E. | Pengelola Akuntansi | 722.300 |
| 50 | HJ. ST. HASNANI | Pengelola Data Laporan Kas | 722.300 |
| 51 | SYAMSU ISTIQLAL, SE | Kepala Sub Bidang Akuntansi Aset | 1.148.100 |
| 52 | SITTI RAHMAH, S.E., M.Si. | Penyusun Laporan Keuangan | 736.300 |
| 53 | BAHARUDDIN, S.Sos | Pengadministrasi Umum | 722.300 |
| 54 | Hj. NURTINAH, S.Sos | Kepala Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan | 925.000 |
| 55 | | Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara | 1.000.000 |
| 56 | HJ. NURALAM, S.Sos. | Pengelola Pelaporan dan Evaluasi APBD | 722.300 |
| 35. BAPENDA | | | |
| 1 | ANDI MUHAMMAD, SE, M.Si | Kepala Badan | 5.970.100 |
| 2 | SYAMSUDDIN, S.IP, M.Si | Sekretaris | 1.333.800 |
| 3 | IMANULLAH KHAN, SE | Kasubag. Program dan Keuangan | 368.100 |
| 4 | ROS LAELA DAMIS, S.Sos | Bendahara Pengeluaran pada Sub Bag. Program & Keuangan | 706.300 |
| 5 | UJEDDIN | Pengelola Gaji pada Sub Bag. Program & Keuangan | 250.000 |
| 6 | HASMA USMAN | Bendahara Penerima pada Sub Bag. Program & Keuangan | 642.300 |
| 7 | Hj. ROSMALINA, S.Sos | Kasubag. Umum dan SDM | 499.999 |
| 8 | IDA MEGA RACHMAWATY | Pengelola Kepegawaian pada Sub Bagian Umum & SDM | 42.300 |
| 9 | MUHAMMAD SOPYAN | Pranata Barang & Jasa pada Sub Bagian Umum & SDM | 966.666 |
| 10 | ANDI WARDHANI, S.Sos, M.Si | Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan | 380.150 |
| 11 | MUSTAMIN, S.Sos, MM | Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan | 499.999 |

| NO | NAMA | NAMA JABATAN | JUMLAH TPP LAINNYA (Rp) |
|-----------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 12 | AMAR, SE | Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi | 499.999 |
| 13 | FAHRISAL | Analisis Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pajak daerah dan Retribusi daerah | 66.666 |
| 14 | ANDI ERNA JAYA, S.IP | Analisis Pendapatan Daerah | 266.666 |
| 15 | MUH. YASSIR, S. Sos, M. Si | Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan | 260.150 |
| 16 | H. SYUKUR | Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan | 547.650 |
| 17 | IRPAN, SE | Pengelola Wajib Pajak / Retribusi Daerah pada Sub Bidang Pendaftaran & Pendataan | 272.300 |
| 18 | ANDI ABDUL HAKIM | Pengelola Wajib Pajak / Retribusi Daerah pada Sub Bidang Pendaftaran & Pendataan | 72.300 |
| 19 | ALIMBACHRI | Pengelola Data Informasi Perpajakan | 22.300 |
| 20 | ANDI ARSIDI, S.Si | Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan | 368.100 |
| 21 | ZAKIAH, SE | Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Daerah pada Sub. Bidang Perhitungan & Penetapan | 272.300 |
| 22 | ALIMUDDIN. S.Sos | Pengelola wajib pajak/Retribusi Daerah pada Sub. Bidang Perhitungan & Penetapan | 72.300 |
| 23 | NURUL HAQ ARMA PUTRA, S.Kom | Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi | 433.333 |
| 24 | RIO DARMAWAN, SE | Pengelola Data & Informasi Perpajakan pada Sub. Bidang Pengelolaan Data & Informasi | 233.333 |
| 25 | MAKMUR, SE | Kepala Sub. Bidang Penagihan, Keberatan, dan Penindakan | 499.999 |
| 26 | JAMAL ADNAN PALAGUNA, SE | Pengelola pelaporan Keuangan Daerah pada Sub. Bidang Pembukuan & Pelaporan | 299.999 |
| 27 | SAHLAN | Pengelola pelaporan Keuangan Daerah pada Sub. Bidang Pembukuan & Pelaporan | 266.666 |
| 28 | ANDI ARLIATI, SE | Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Benda Berharga | 368.100 |

| NO | NAMA | NAMA JABATAN | JUMLAH TPP LAINNYA (Rp) |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29 | HARLINA | Bendahara Kuasi | 466.666 |
| 30 | ADAM MALIK KARIM | Pengadministrasian Sarana dan Prasarana pada Sub Bidang Sarana & Prasarana Benda Berharga | 88.300 |
| 36. BKPSDM | | | |
| 1 | Ir. H. NASRUDDIN, M. A. P | Kepala Badan | 6.189.550 |
| 2 | Ir. AHMAD | Sekretaris | 753.800 |
| 3 | HERMAN | Pengelola Program dan Kegiatan | 42.300 |
| 4 | SURYANI NUR, S. Sos | Bendahara | 550.000 |
| 5 | SURIYANTI, S. Sos | Pengelola Gaji | 250.000 |
| 6 | RAMLAH, N | Pranata Barang dan Jasa | 700.000 |
| 7 | Dr. MUKTI, SH,MH | Kepala Bidang Mutasi, Promosi, dan Pengembangan Karir | 350.150 |
| 8 | IRIANI SIRAUDDIN, S. Sos | Kepala Subbidang Mutasi | 68.100 |
| 9 | YULITA. L, S. Sos | Penyusun Rencana Mutasi | 189.000 |
| 10 | NURWINA, S.A.P, M.A.P | Kepala Subbidang Kepangkatan | 189.000 |
| 11 | MULYADITHALIB | Pengelola Sistem Informasi Manajemn Kepegawaian | 189.000 |
| 12 | LUKMAN | Pengelola Kepegawaian | 189.000 |
| 13 | MUHAMMAD HARIS RAHIM, S. A. P | Kepala Subbidang Pengembangan Karir, Promosi & Kompetensi | 150.000 |
| 14 | HASANUDDIN RASYID, S. Pd | Kepala Subbidang Penilaian & Evaluasi Kinerja | 24.100 |
| SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN DAN STAF AHLI | | | |
| 1 | | Sekretaris Daerah | 12.771.850 |
| 2 | HERMAN JAYA, S.IP | Asisten Administrasi Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | 3.471.000 |
| 3 | Drs. USMAN ARSYAD, MM | Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan | 3.471.000 |
| 4 | | Asisten Administrasi Umum | 5.971.000 |
| 5 | Ir. NUR SALAM, M.Si. | Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum Dan Politik | 3.889.050 |
| 6 | | Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sdm | 3.889.050 |
| 7 | | Staf Ahli Bidang Pembangunan Dan Ekonomi | 3.889.050 |


BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BARRU.

NOMOR :25 TAHUN 2019

TANGGAL :1 AGUSTUS 2019

BOBOT INDIKATOR DAN DASAR HITUNG,

PERHITUNGAN KETERPENUHAN PENCAPAIAN DISIPLIN

A. UMUM

TPP dinilai berdasarkan atas pencapaian disiplin dan pencapaian kinerja yang dinilai harian kemudian diakumulasi dalam satu masa penilaian TPP.

Penilaian TPP masing-masing memiliki bobot perhitungan yaitu :

- a. pencapaian disiplin memiliki bobot TPP 40 % (empat puluh persen);
dan
- b. pencapaian Kinerja memiliki bobot TPP 60 % (enam puluh persen).

Pencapaian disiplin dinilai setiap hari berdasarkan keterpenuhan 6 (enam) indikator, yaitu:

1. keterpenuhan apel masuk;
2. keterpenuhan apel pulang;
3. keterpenuhan upacara penaikan bendera hari Senin;
4. keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional;
5. keterpenuhan jam kerja harian; dan
6. keterpenuhan hari kerja.

Keenam indikator pencapaian disiplin diberi nilai pembobotan sesuai keutamaannya dalam pencapaian disiplin, dengan penetapan bobot indikator sebagai berikut:

- a. apel masuk, bobot 15 %;
- b. apel pulang, bobot 15 %;
- c. upacara penaikan bendera hari senin, bobot 10 %;
- d. upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional, bobot 5 %;
- e. jam kerja harian, bobot 30 %; dan

f. hari kerja bobot 25 %.

Dasar hitung keterpenuhan 6 (enam) indikator pencapaian disiplin ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan hari kerja dan kondisi eksisting setiap bulan kalender berjalan.

Dasar hitung dan alat bukti keterpenuhan pencapaian disiplin, yaitu :

- a. dasar hitung apel masuk adalah sesuai jumlah hari kerja pada setiap bulan kalender berjalan dibuktikan dengan absen apel masuk;
- b. dasar hitung apel pulang adalah sesuai jumlah hari kerja pada setiap bulan kalender berjalan dibuktikan dengan absen apel pulang;
- c. dasar hitung upacara penaikan bendera hari senin adalah sesuai jumlah upacara hari senin yang diselenggarakan pada setiap bulan kalender berjalan dibuktikan dengan daftar hadir upacara;
- d. dasar hitung upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional adalah sesuai jumlah upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional yang diselenggarakan pada setiap bulan kalender berjalan dibuktikan dengan daftar hadir upacara;
- e. dasar hitung jam kerja harian adalah sebanyak 7 jam 30 menit per hari kerja dikalikan dengan jumlah hari kerja pada setiap bulan kalender berjalan, dibuktikan dengan perhitungan waktu pada print out hasil ceklok/waktu absensi tertulis; dan
- f. dasar hitung keterpenuhan hari kerja adalah sesuai jumlah hari kerja pada setiap bulan kalender berjalan dibuktikan dengan kehadiran pada print out hasil ceklok/absensi tertulis.

Teknis pengiputan perhitungan keterpenuhan pencapaian disiplin pada aplikasi e-kinerja, yaitu:

1. **Apel Masuk.**

Keterpenuhan apel masuk meliputi keikutsertaan pegawai pada setiap pelaksanaan kegiatan apel masuk pada pagi hari di setiap hari kerja kecuali pada saat dilaksanakannya upacara bendera setiap hari senin, upacara peringatan hari besar nasional, atau upacara peringatan lainnya yang diatur pelaksanaannya oleh Pemerintah Kabupaten Barru.

Keterpenuhan apel masuk pencapaiannya dihitung setiap bulan sesuai dengan jumlah pelaksanaan apel yang diikuti oleh setiap pegawai

dibandingkan dengan jumlah pelaksanaan apel yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Barru pada bulan berjalan.

Hasil perhitungan pencapaian keterpenuhan apel masuk kerja yang diikuti oleh setiap pegawai menjadi dasar perhitungan penetapan nilai pembayaran TPP berdasarkan pencapaian disiplin pegawai yang dinilai.

Ketentuan teknis keterpenuhan apel masuk diatur sebagai berikut:

1. Dianggap mengikuti/menghadiri apel masuk apabila pegawai hadir secara fisik pada saat pelaksanaan apel masuk dibuktikan dengan tanda tangan pegawai yang dinilai pada daftar absensi apel masuk;
2. Pegawai yang alpa/tidak masuk kantor tanpa keterangan, izin, dianggap tidak mengikuti/menghadiri apel masuk;
3. Pegawai yang sedang tugas luar dianggap mengikuti/menghadiri apel masuk yang didukung dan dibuktikan dengan surat tugas;
4. Pegawai yang mengikuti/memenuhi undangan/kegiatan dan/atau diundang oleh pimpinan yang pelaksanaannya dimulai jam 07.30 dan/atau sebelumnya pada hari kerja dianggap mengikuti/menghadiri apel masuk;
5. Ketentuan keterpenuhan apel masuk menyesuaikan dengan ketentuan kerja selama bulan ramadhan. Apabila ketentuan kerja menyatakan tidak dilaksanakan apel masuk selama bulan ramadhan maka keterpenuhan apel masuk tetap dianggap terpenuhi selama hari kerja pada bulan Ramadhan.

2. Apel Pulang

Keterpenuhan apel pulang meliputi keikutsertaan pegawai pada setiap pelaksanaan kegiatan apel pulang yang diatur pelaksanaannya oleh pemerintah Kabupaten Barru.

Keterpenuhan apel pulang pencapaiannya dihitung setiap bulan sesuai dengan jumlah pelaksanaan apel pulang yang diikuti oleh setiap pegawai dibandingkan dengan jumlah pelaksanaan apel pulang pada bulan berjalan.

Hasil perhitungan keterpenuhan apel pulang yang diikuti oleh setiap pegawai menjadi dasar perhitungan penetapan nilai pembayaran TPP berdasarkan pencapaian disiplin pegawai yang dinilai.

Ketentuan teknis pengisian keterpenuhan apel pulang diatur sebagai berikut:

1. Dianggap mengikuti/menghadiri apel pulang apabila pegawai hadir secara fisik pada saat pelaksanaan apel pulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Barru dan dibuktikan dengan tanda tangan pegawai yang dinilai pada daftar absensi apel pulang dimaksud;
2. Pegawai yang alpa/tidak masuk kantor tanpa keterangan, sakit, izin, cuti dianggap tidak mengikuti/menghadiri apel pulang;
3. Pegawai yang sedang tugas luar dianggap mengikuti/menghadiri apel pulang yang dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang diakui;
4. Pegawai yang mengikuti/memenuhi undangan/kegiatan dan/atau diundang oleh pimpinan yang pelaksanaannya dimulai jam 16.00 dan/atau sesudahnya pada hari kerja dianggap mengikuti/menghadiri apel pulang;
5. Pegawai yang bertugas mengantar surat dalam wilayah ibu kota kabupaten (tanpa surat tugas) yang pelaksanaannya sampai dengan jam 16.00 atau sesudahnya dianggap mengikuti/menghadiri apel pulang;
6. Ketentuan keterpenuhan apel pulang menyesuaikan dengan ketentuan kerja selama bulan ramadhan. Apabila ketentuan kerja menyatakan tidak dilaksanakan apel pulang selama bulan ramadhan maka keterpenuhan apel pulang tetap dianggap terpenuhi selama hari kerja pada bulan ramadhan;

3. Jam Kerja

Keterpenuhan jam kerja pegawai kaitannya dengan TPP berdasarkan pencapaian disiplin meliputi jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu 37 jam 30 menit perpekan atau 7 jam 30 menit perhari dibuktikan dengan perhitungan waktu pada print out hasil ceklok atau waktu absensi tertulis.

Keterpenuhan jam kerja pencapaiannya dihitung setiap hari dan diakumulasi perbulan sesuai dengan jumlah jam kerja yang dihadiri oleh setiap pegawai dibandingkan dengan jumlah jam kerja pada bulan berjalan yang diselenggarakan pada Pemerintah Kabupaten Barru.

Hasil perhitungan pencapaian keterpenuhan jam kerja yang dihadiri oleh setiap pegawai menjadi dasar perhitungan penetapan nilai

pembayaran TPP berdasarkan pencapaian disiplin bagi pegawai yang dinilai.

Ketentuan teknis yang terkait dengan keterpenuhan jam kerja diatur sebagai berikut:

1. Dianggap memenuhi jam kerja apabila pegawai melakukan ceklok pada absensi elektronik atau mengisi daftar jam masuk pada absensi tertulis pada setiap hari kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku pada pemerintah Kabupaten Barru
2. Dibuktikan dengan hasil *check clock* pegawai yang bersangkutan pada mesin absensi pada saat masuk, setelah jam istirahat dan pulang kerja;
3. Pegawai yang alpa/tidak masuk kantor tanpa keterangan, sakit, cuti dianggap tidak memenuhi jam kerja;
4. Pegawai yang sedang tugas luar dianggap memenuhi jam kerja apabila didukung dan dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang diakui;
5. Ketentuan keterpenuhan jam kerja menyesuaikan dengan ketentuan kerja selama bulan Ramadhan

4. Hari Kerja

Keterpenuhan hari kerja pegawai kaitannya dengan TPP berdasarkan pencapaian disiplin meliputi kehadiran pegawai sesuai dengan ketentuan hari kerja.

Keterpenuhan hari kerja pencapaiannya dihitung setiap bulan sesuai dengan jumlah hari kerja yang dihadiri oleh setiap pegawai dibandingkan dengan jumlah hari kerja pada bulan berjalan.

Hasil perhitungan pencapaian keterpenuhan hari kerja yang dihadiri oleh setiap pegawai menjadi dasar perhitungan penetapan nilai pembayaran TPP berdasarkan Pencapaian Disiplin bagi pegawai yang dinilai.

Ketentuan teknis keterpenuhan hari kerja diatur sebagai berikut:

1. Dianggap memenuhi hari kerja apabila pegawai hadir secara fisik pada setiap hari kerja dibuktikan dengan hasil *check clock*/absensi pegawai yang bersangkutan pada mesin absensi/absensi tertulis pada saat masuk dan pulang kerja;

2. Pegawai yang alpa/tidak masuk kantor tanpa keterangan, sakit, cuti dianggap tidak memenuhi hari kerja;
3. Pegawai yang sedang tugas luar dianggap memenuhi hari kerja apabila didukung dan dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang diakui;
4. Ketentuan keterpenuhan hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan kerja selama bulan ramadhan;

C. FORMAT ABSEN :

KOP SKPD/UPTD/Unit Kerja

DAFTAR HADIR APEL MASUK / PULANG

Hari / Tanggal :

| No | NAMA /NIP | PANGKAT GOL. RUANG | JAM MASUK | TTD | JAM PULANG | TTD |
|-----|-----------|-----------------------|--------------|-----|---------------|--------|
| 1 | | | | | | 1..... |
| 2 | | | | | | 2... |
| 3 | | | | | | 3..... |
| --- | | | | | | |

Rekapitulasi

| |
|-----------------------------------|
| HADIR :MASUKPULANG |
|-----------------------------------|

| |
|----------------------------------|
| ALPA :MASUKPULANG |
|----------------------------------|


| |
|---------------------------------------|
| TUGAS LUAR:MASUKPULANG |
|---------------------------------------|

MENGETAHUI
 KEPALA SKPD/UPTD/Unit Kerja

PENANGGUNG JAWAB

(.....)
 NIP. :

(.....)
 NIP :


BUPATI BARRU,
SUARDI SALEH

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI BARRU.

NOMOR : 25 TAHUN 2019

TANGGAL: 1 AGUSTUS 2019

LAPORAN HARIAN DAN NILAI INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA

A. UMUM

TPP dinilai berdasarkan atas pencapaian disiplin dan pencapaian kinerja yang dinilai harian kemudian diakumulasi dalam satu masa Penilaian TPP. Penilaian TPP masing-masing memiliki bobot perhitungan yaitu :

- a. pencapaian disiplin memiliki bobot TPP 40 % (empat puluh persen);
dan
- b. pencapaian kinerja memiliki bobot TPP 60 % (enam puluh persen).

Pengukuran pencapaian kinerja melalui laporan harian yang dilaporkan paling lambat 1 kali 24 jam sejak terlaksananya kegiatan oleh pegawai yang dinilai kepada atasan langsungnya dan dinilai setiap hari oleh atasan langsungnya berdasarkan 2 (dua) kriteria yang terbagi sebagai berikut.

1. Ketepatan waktu dan ada tidaknya laporan harian dengan nilai maksimal 30, terbagi pada 3 (tiga) indikator penilaian, yaitu :
 - a. pelaporan tepat waktu, memiliki nilai 30;
 - b. pelaporan terlambat memiliki nilai 20; atau
 - c. tidak ada laporan memiliki nilai 0.
2. kesesuaian laporan dengan uraian tugas dengan nilai maksimal 70 yang terbagi pada 2 (dua) indikator penilaian, yaitu :
 - a. melaksanakan tugas pokok dan/atau tugas tambahan memiliki nilai 70;
 - b. Tidak melaksanakan tugas pokok dan/atau tugas tambahan tidak memiliki nilai atau 0.

B. PELAPORAN HARIAN

Pengelolaan TPP berdasarkan pencapaian kinerja, maka setiap pegawai diwajibkan menyusun/menginput laporan harian kegiatan yang sebenar-benarnya sesuai dengan format yang ada di aplikasi e-kinerja.

a. Menginput Laporan Harian di aplikasi e-kinerja :

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Buka aplikasi e-kinerja dengan memasukkan alamat web https://e-kinerja.bkpsdmbarru.com di browser, setelah terbuka :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Input NIP tanpa spasi 2. Masukkan password 3. Klik "Masuk" 4. Klik opsi |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 5. Klik menu "Atur Atasan" 6. Input NIP atasan 7. Klik "Simpan" 8. Klik ikon pilihan menu |
|--|--|--|

The first screenshot shows the home screen of the e-Kinerja application. A red circle labeled '9' highlights the 'Input Laporan Harian' button. The second screenshot shows the 'Tambah Data' form. A red circle labeled '10' highlights the 'Tambah Data' button at the top right. A red circle labeled '11' highlights the 'Tanggal Laporan' input field. A red circle labeled '12' highlights the status dropdown menu. A red circle labeled '13' highlights the 'Simpan' button at the bottom right.

9. Klik menu "Input Laporan Harian"
10. Klik "Tambah Data"
11. Input tanggal Laporan yang mau dilaporkan
12. Klik tanda panah di status dan pilih satu diantara 2 pilihan :
 - a. Pilih "Hari Kerja" apabila kegiatan yang dilaporkan dikerjakan pada hari kerja
 - b. Pilih "Bukan Hari Kerja" apabila kegiatan yang dilaporkan dikerjakan di luar hari kerja.
13. Klik "Simpan"

The third screenshot shows the 'Input Laporan Harian' form. A red circle labeled '14' highlights the date field. A red circle labeled '15' highlights the status dropdown menu. A red circle labeled '16' highlights the 'Tambah' button. The fourth screenshot shows the 'Daftar Laporan Harian' list. A red circle labeled '17' highlights the 'Tambah' button. A red circle labeled '18' highlights the 'Kegiatan Ke-' field. A red circle labeled '19' highlights the 'Uraian Tugas' field. A red circle labeled '20' highlights the 'Jam' field. A red circle labeled '21' highlights the 'Output' field. A red circle labeled '22' highlights the 'Simpan' button.

14. Periksa tanggal kegiatan yang mau dilaporkan
15. Klik tanda panah (warna biru)
16. Periksa kesesuaian hari dan tanggal kegiatan yang mau di laporkan
17. Klik "Tambah"
18. Input nomor urut kegiatan
19. Input uraian tugas/kegiatan
20. Input jam kegiatan (mulai jam – selesai jam)
21. Input output
22. Klik "Simpan"

Untuk menginput laporan harian kegiatan ke 2 dan seterusnya, ulangi nomor 16 sampai 21

The fifth screenshot shows the 'Daftar Detail Laporan Harian' list. A red circle labeled '23' highlights the 'Kirim Laporan Keatasan' button.

23. Setelah laporan harian selesai (semua pekerjaan /kegiatan dalam satu hari sudah diinput) klik "Kirim Laporan Keatasan"

b. Menilai Laporan Harian Pegawai yang di Nilai pada aplikasi e-kinerja

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Buka aplikasi e-kinerja dengan memasukkan alamat web https://e-kinerja.bkpsdmbarru.com di browser, setelah terbuka :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Input NIP tanpa spasi 2. Masukkan password 3. Klik "Masuk" 4. Klik opsi |
|--|--|---|

| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>NIP</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal</th> <th>Aksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>192209092007032004</td> <td>SITI RAODA</td> <td>2019-05-17</td> <td>[Icon]</td> </tr> </tbody> </table> | NIP | Nama | Tanggal | Aksi | 192209092007032004 | SITI RAODA | 2019-05-17 | [Icon] | <ol style="list-style-type: none"> 5. Cek apakah ada notifikasi pegawai yang belum dinilai 6. Klik menu "Setujui Laporan Bawahan" 7. Pastikan kesesuaian pegawai yang dinilai dengan memperhatikan NIP, atau 8. Nama pegawai yang dinilai 9. Cek Tanggal pekerjaan/ kegiatan yang dilaporkan oleh pegawai yang di nilai 10. Klik aksi "ikon warna biru" |
|--------------------|---|------------|--------|---------|------|--------------------|------------|------------|--------|---|
| NIP | Nama | Tanggal | Aksi | | | | | | | |
| 192209092007032004 | SITI RAODA | 2019-05-17 | [Icon] | | | | | | | |

11. Perhatikan "Rekomendasi Sistem" "Selisih hari dari waktu pembuatan laporan"

a. Selisih 0 hari dan 1 hari dianggap tepat waktu

b. Selisih 2 hari atau lebih dan masih dalam masa penilaian TPP dianggap terlambat

12. Klik tanda panah pada sub menu "Ketepatan Waktu" :

a. Pilih "Tepat Waktu" apabila rekomendasi sistem 0 hari atau 1 hari;

b. Pilih "Terlambat" apabila rekomendasi sistem 2 hari atau lebih dan masa dalam masa Penilaian TPP;

c. Pilih "Tidak Ada Laporan" apabila tanggal laporan yang dikirim melebihi masa penilaian TPP

| Tidak | Status Tugas | Detail | Keluaran |
|-------|---|--------|---------------------|
| 1 | Masih lanjut | 07:00 | Enkripsi per... |
| 2 | Tidak ada hari Sabtu/Dominan dan Lintasan | 08:30 | Siapa... |
| 3 | Perencanaan cap PMS an | 09:45 | Waktu... |
| 4 | Masih ditinjau dan menyiapkan laporan | 10:45 | 2 laporan |
| 5 | Masih ditinjau dan lanjut | 10:45 | 1 surat |
| 6 | Mempunyai petunjuk teknis pengalihan PPTK | 11:25 | 1 surat petunjuk... |
| 7 | Selesai | 12:00 | |
| 8 | Selesai | 12:50 | |
| 9 | Selesai | 13:00 | |

13. Gulir layar android keatas dan periksa laporan pegawai yang dinilai.

14. Klik tanda Panah pada "Kesesuaian Laporan", pilih:

a. Melaksanakan tugas pokok/tugas tambahan, atau

b. Tidak melaksanakan tugas pokok/tugas atmbahan

15. Klik tanda panah pada sub menu "Putusan"

a. Pilih "Disetujui" apabila detail laporan harian sudah benar dan sesuai dengan yang dikerjakan;

b. Pilih "Revisi" apabila detail laporan harian tidak sesuai atau ada yang perlu diperbaiki.


16. Tambahkan catatan revisi apabila memilih "Revisi" pada sub menu putusan


17. Klik "Proses" apabila memilih disetujui pada sub menu putusan atau memilih revisi dan telah menambahkan catatan revisi

C. PENGHITUNGAN KETERPENUHAN PENCAPAIAN KINERJA

Teknis Perhitungan keterpenuhan pencapaian kinerja, yaitu :

1. Keterpenuhan pencapaian kinerja diolah oleh sistem aplikasi e-kinerja berdasarkan tanggal dan nilai laporan harian yang telah diverifikasi oleh atasan langsung atau pegawai yang ditunjuk;
2. Pengisian kewajiban laporan harian dilakukan sesuai dengan hari kerja pada bulan berjalan.
3. Pengisian nilai ketepatan waktu dilakukan setiap hari berdasarkan nilai pada laporan harian yang telah diverifikasi oleh atasan langsung;
4. Nilai TPP harian ditentukan oleh sistem berdasarkan hasil bagi antara TPP maksimal pencapaian kinerja dibagi jumlah hari kerja pada bulan berjalan.


BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH